

# KAMIKAWA

**JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KAMIKAWA****Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Inovasi**Website jurnal : <https://journal.babelprov.go.id/index.php/kamikawa/index>***POLICY PAPER*****STRATEGI MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE TOURISM* BANGKA  
BELITUNG DI ERA POST COVID-19*****STRATEGY TO ACHIEVE BANGKA BELITUNG'S SUSTAINABLE  
TOURISM IN THE POST COVID-19 ERA*****Atik Yulianti<sup>1\*</sup>**<sup>1</sup> *Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**\*atik\_yulianti@yahoo.com***ABSTRAK**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19. Hal ini mengakibatkan perlambatan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mempertimbangkan bahwa pariwisata merupakan sektor utama penopang ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan suatu kebijakan *sustainable tourism* untuk membangun resiliensi pariwisata di Provinsi Bangka Belitung. Dengan metode SWOT serta mempertimbangkan Indikator utama *sustainable tourism* maka kebijakan yang dapat diusulkan untuk membangun resiliensi pariwisata Bangka Belitung diantaranya adalah peningkatan destinasi, perluasan fokus industri pariwisata menuju digital tourism. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menuju digital tourism adalah peningkatan destinasi pariwisata yang dapat dinikmati secara digital, peningkatan kapasitas SDM serta pelibatan masyarakat lokal termasuk swasta dalam pembangunan infrastruktur pariwisata termaksud.

**Kata kunci: *Sustainable Tourism, Digital Tourism, Bangka Belitung, Post COVID-19*****ABSTRACT**

*Tourism is one of the sectors most affected by COVID-19. It make a slowdown in the economy of the Bangka Belitung Islands Province. Considering that tourism is the main sector that supports the economy of the Bangka Belitung, a sustainable tourism policy is needed to rebuild tourism resilience in Bangka Belitung Province. With the SWOT method and considering the indicators of sustainable tourism, the policies that can be proposed to build tourism resilience in Bangka Belitung include increasing destinations, expanding the focus of the tourism industry towards digital tourism. The strategies that can be carried out by the Government of the Bangka Belitung towards digital tourism are increasing tourism destinations that can be enjoyed digitally, increasing human resource capacity and involving local communities including the private sector in the development of the tourism infrastructure.*

**Keywords: *Sustainable Tourism, Digital Tourism, Bangka Belitung, Post COVID-19***

## 1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang telah berjalan hampir 2 (dua) tahun telah mengubah segala aspek kehidupan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), pelarangan mudik, penerapan normal baru (*new normal*) serta kebijakan lainnya yang telah diterbitkan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 telah mengubah pola kegiatan sehari-hari masyarakat. Kebijakan pembatasan yang menyebabkan ketidakpastian tersebut membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup dalam yaitu sebesar -2.07%. Namun seiring dengan semakin membaiknya penanganan COVID 19, kondisi ekonomi mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2021 menunjukkan angka yang membaik jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal II Tahun 2021 berada pada angka -0.74%. Meskipun masih belum seperti tahun sebelum Pandemi COVID 19, namun secara umum indikator tersebut memberikan harapan positif untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya (BPS, 2021).

Pembatasan-pembatasan sebagaimana tersebut di atas berdampak kepada hampir semua sektor industri. Sektor industri yang terdampak harus beradaptasi agar tetap dapat *survive*. Adaptasi dari sisi cara kerja, model bisnis, maupun hal teknis lainnya sehingga memungkinkan industri yang terdampak tersebut untuk tetap dapat beroperasi di masa-masa pembatasan.

Salah satu industri yang paling terdampak adalah industri pariwisata. Industri pariwisata bertumpu pada aktifitas mengumpulkan massa, perpindahan massa, dan kegiatan *outdoor*. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, aktifitas – aktifitas tersebut adalah yang paling dibatasi pada dan bahkan dilarang untuk dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berdampak kepada industri pariwisata seolah menjadi mati suri selama 2 (dua) tahun terakhir.

Jika ditotal, sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Bisa dibayangkan, angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. (Kemenparekraf, 2021)

Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar-masuk Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata pada tahun 2021 sebesar Rp20,7 miliar. Parahnya, penurunan wisatawan mancanegara berdampak langsung pada okupansihotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari-Februari, okupansimasih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun di bulan Maret menjadi 32,24%, dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67%. (Kemenparekraf, 2021)

Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. (BPS, 2021)

Untuk memberikan stimulus kepada industri terdampak, Pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian, dalam press release tanggal 27 September 2021, menyampaikan bahwa Pemerintah telah meluncurkan program untuk pemulihan sektor pariwisata diantaranya adalah Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care di sektor perhotelan dan pariwisata. Disamping program tersebut, Pemerintah melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga mengalokasikan sebesar 7,67 Triliun rupiah pada tahun ini, untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata. Artinya bahwa Pemerintah telah berusaha secara serius untuk melaksanakan pemulihan sektor pariwisata.

Dengan semakin membaiknya kondisi penanganan COVID-19 baik secara dunia maupun nasional, hal ini juga berdampak kepada sedikit membaiknya iklim pariwisata nasional. Kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama dan pintu lainnya bulan Januari s.d. Februari 2022 berjumlah 33.593 kunjungan atau mengalami pertumbuhan sebesar 259,59% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang berjumlah 9.342 kunjungan. (Kemenparekraf, 2022)

Bangka Belitung sebagai salah satu wilayah Indonesia yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan juga merasakan dampak yang sangat signifikan dari pandemi COVID-19. Adapun BPS mencata bahwa laju

pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di angka -2.3% atau terkoreksi 5.3 dari tahun 2019 yang pertumbuhan ekonominya berada pada angka 3.32%. (BPS Bangka Belitung, 2020).

Namun demikian, dengan keberhasilan pengendalian COVID-19 dan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif di angka 5.05% atau mengalami peningkatan sebesar 1.73 dari tahun 2019.

Begitu juga dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung. Pada tahun 2020 total wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung hanya mencapai 223.951 wisatawan atau turun sebesar 48% jika dibanding tahun 2019 yang mencapai 438.373 wisatawan. Penurunan yang cukup drastis tersebut sangat memukul sektor pariwisata Bangka Belitung. Namun demikian, sejalan dengan keberhasilan pemerintah dalam pengendalian COVID-19 pada tahun 2021 jumlah wisatawan mulai mengalami peningkatan sebesar 39% jika dibandingkan dengan tahun 2020 atau sebanyak 313.040 wisatawan. Meskipun masih dibawah dari rata-rata tahun sebelumnya, diharapkan dengan semakin membaiknya kondisi penanganan COVID-19 secara nasional dan daerah, diharapkan mampu memulihkan industri pariwisata Bangka Belitung.

Secara umum, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki setidaknya 462 objek wisata terbaik yang layak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Destinasi wisata tersebut meliputi wisata alam (280), daya Tarik wisata budaya (151), maupun daya Tarik wisata buatan (31). Hal tersebut merupakan potensi yang cukup besar bagi Bangka Belitung. Memperhatikan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling mudah terpengaruh dengan pandemi dan kebijakan pemerintah sehingga diperlukan strategi pariwisata yang berkelanjutan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga kedepan sektor pariwisata Bangka Belitung dapat tetap bertahan dalam kondisi-kondisi yang sulit akibat pengaruh dari kondisi eksternal seperti wabah penyakit, bencana alam, maupun pandemi lainnya.

## 2. Kajian Pustaka

### Industri Pariwisata di Bangka Belitung

Departemen Budaya dan Pariwisata (2005) menyatakan pariwisata sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian. Dengan ekonomi yang maju pariwisata akan berkembang

karena didukung oleh kesejahteraan penduduk dan fasilitas daerah tujuan wisata yang memadai. Hal sebaliknya juga dapat terjadi yaitu pariwisata dapat mendorong perekonomian regional dan nasional.

Kegiatan pariwisata akan menimbulkan *demand* akan barang dan jasa yang selanjutnya akan merangsang pertumbuhan produksi. Menurut Spillane (1994:132) ada beberapa elemen dalam menentukan hubungan pariwisata dengan pembangunan ekonomi, yaitu: (a) jenis pariwisata, (b) struktur ekonomi nasional, (c) hubungan antara perpindahan modal dan migrasi tenaga kerja. Hal ini mengisyaratkan bahwa pariwisata dalam pembangunan ekonomi nasional tergantung secara parsial pada organisasi permodalan dan khususnya kemampuan modal dari luar negeri untuk ditanamkan di dalam negeri. Pariwisata memainkan peranan yang sangat penting dalam strategi ekonomi di berbagai negara.

Menurut World Travel and Tourism Council (WTTC) 1992 dalam pengembangan usaha pariwisata merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Industri pariwisata merupakan alternatif bagi negara-negara terbelakang dan sedang membangun dalam meningkatkan perekonomiannya.

Usaha pariwisata merupakan usaha yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Untuk memperbesar andilnya dalam perekonomian daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kegiatan ekonomi (Unsri dan Bappeda Mura, 2004: II-6).

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan usaha pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994: 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia.

Dalam konteks pariwisata sebagai industri, Pendit (2006:40) telah memperkenalkan beberapa

istilah seperti *industry of the invisible export* (industri ekspor tidak nyata), *hospitality industry* (industri ramah tamah), atau *service industry* (industri jasa pelayanan). Adapun batasan tentang industri pariwisata menurut Yoeti (1990:56) adalah kumpulan dari bermacam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan traveller pada umumnya, selama dalam perjalanannya.

Sebagai sebuah industri, Wardiyanta (2006:78) menyatakan pariwisata mempunyai sifat yang khas, tidak hanya melibatkan banyak industri, yakni transportasi, akomodasi, jasa boga, atraksi, retail, tetapi bersifat menyerap banyak tenaga kerja yang pada akhirnya juga memiliki implikasi politis yang besar. Dalam pengembangan pariwisata, sangat diperlukan sebuah kebijakan untuk dapat meminimalisasi dampak negatif yang sering timbul.

Menurut Prajogo (1976:57) pariwisata sebagai industri mempunyai beberapa sifat khusus, yang membedakannya dengan industri lain. Sifat khusus tersebut adalah: (a) produk wisata mempunyai ciri bahwa ia tidak dapat dipindahkan. Orang tidak dapat membawa produk wisata pada langganannya, tetapi langganannya itu sendiri harus mengunjunginya, mengalami dan datang untuk menikmati produk wisata itu, (b) dalam pariwisata produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang sama. Tanpa langganannya yang sedang mempergunakan jasa-jasa itu tidak akan terjadi produksi, (c) sebagai suatu jasa, maka pariwisata memiliki berbagai ragam bentuk, oleh karena itu dalam pariwisata tidak terdapat standar ukuran yang obyektif, (d) langganannya tidak dapat mencicipi, mengetahui atau menguji produk itu sebelumnya, yang dapat dilihat hanya brosur-brosur, gambar-gambar, (e) dari segi usaha, produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar.

Industri pariwisata memerlukan modal yang besar, sedangkan permintaan sangat peka terhadap perubahan situasi ekonomi, politik, sikap masyarakat, kesenangan wisatawan dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi industri pariwisata menurut Spillane (1987:89) adalah (a) pertumbuhan pendapatan nyata dan wisatawan yang bersangkutan, semakin tinggi pendapatan nyata semakin bertambah juga pendapatan yang dapat disisihkan untuk perjalanan wisata, (b) wisatawan yang bersangkutan termasuk golongan orang-orang memperoleh pembiayaan cuti yang diambil (*paid vacation*), (c) besar kecilnya kurs mata uang dari negara penghasil wisatawan terhadap mata uang negara tujuan mereka. Semakin tinggi nilai

mata uang negara penghasil wisatawan terhadap mata uang negara tujuan mereka, semakin besar pula daya tarik negara tujuan bagi wisatawan yang bersangkutan, (d) perbandingan antara daya tarik suatu negara tujuan wisatawan dengan kebutuhannya untuk berkunjung ke sana, (e) kemudahan pencapaian dan tersedianya fasilitas transportasi. Berapapun besarnya suatu daerah tujuan wisata, jika sulit untuk dicapai dan fasilitas tidak memadai, maka keinginan wisatawan untuk ke sana pun pudar, (f) faktor-faktor penting lainnya adalah *air travel policies*, *landing rights* dan tarif penerbangan, yaitu intensitas usaha usaha promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh negara tujuan wisata di negara penghasil wisatawan, dan yang sangat penting adalah sikap dari negara-negara tujuan wisata terhadap pariwisata itu sendiri, baik sikap pemerintah maupun sikap masyarakatnya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung telah mengupayakan pengembangan pariwisata sebagai alternatif perekonomian non tambang. Keindahan pantai dan pulau-pulau kecil di sekeliling pulau Bangka dan pulau Belitung dijadikan sebagai pariwisata unggulan yang diharapkan mampu membangkitkan kondisi perekonomian setempat. Selain wisata pantai, pemerintah juga telah mengembangkan wisata paska tambang (misalnya wisata Danau Kaolin) dan wisata Geopark.

Di level nasional, pemerintah pusat menetapkan pantai Tanjung Kelayar di Belitung sebagai Kawasan Ekoni Khusus (KEK) yang membawa dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Tahun 2017, setelah memiliki KEK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belitung mencapai angka Rp 193 miliar, mengalami kenaikan sebesar 41,21% jika dibanding Pada 2016 yang berada di angka Rp 136,80 miliar. Pemerintah Bangka Belitung pun saat ini sedang merencanakan membuat dua KEK di Tanjung Gunung dengan luas 385 hektare dan Sungai Liat yang memiliki total luas 273 hektare.

Sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga tahun 2017 - 2022 (Renstra Disbudpar) bahwa tujuan dari Industri Pariwisata Bangka Belitung adalah Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Berbasis Budaya Lokal.

Atas visi sebagaimana tersebut di atas, sasaran utama yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun adalah (i) meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor pariwisata (ii) meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata (iii) meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata, dan (iv) meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan

pariwisata yang berkualitas. (Disbudpar Babel, 2017)

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah (a) pengembangan uji kompetensi bagi sumber daya pariwisata. (b) peningkatan kualitas daya tarik wisata, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata (c) Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata, dan (d) Peningkatan pelestarian budaya lokal. (Disbudpar Babel, 2017)

Dalam rangka mengimplementasikan strategi di atas maka kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan adalah (a) pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya (b) peningkatan kualitas pemasaran pariwisata terintegrasi (c) Peningkatan kuantitas Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan professional, dan (d) Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi pariwisata. (Disbudpar Babel, 2017)

Kelembagaan Kepariwisataan, dan (e) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah. (Disbudpar Babel, 2017)

### Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Salim, 1990). Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan diperlukan agar pembangunan yang dilakukan saat ini tetap dapat berlanjut meskipun terdapat tantangan eksternal seperti bencana alam, pandemi maupun wabah.

Menurut Heal, (Fauzi, 2004), konsep keberlanjutan tersebut paling tidak mengandung dua dimensi yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, komponen utama dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dengan perpesktif jangka panjang yang integratif.

Adapun pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewedahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berbasis budaya lokal	Meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor pariwisata	Peningkatan pelestarian budaya lokal	Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya
2		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata	Peningkatan kualitas daya tarik wisata, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi pariwisata
3		Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata terintegrasi
4		Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas	Pengembangan uji kompetensi bagi sumber daya pariwisata	Peningkatan kuantitas Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan professional

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017 s.d 2022

Lebih lanjut lagi, dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka disusunlah Program pengembangan Pariwisata Bangka Belitung yang terdiri dari (a) Program Pelestarian Budaya, (b) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (c) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan

daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Pada Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Termasuk pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang pariwisata yang tetap dapat *survive* ditengah tantangan eksternal seperti bencana alam, pandemi atau wabah lainnya sehingga secara ekonomis masyarakat yang menjalankan pariwisata tetap dapat menikmati keuntungan.

### **Pariwisata di Era Post COVID-19**

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa COVID-19 telah merubah cara masyarakat Indonesia maupun dunia dalam melakukan aktifitas. COVID-19 telah mampu membentuk norma baru dan hal tersebut berlaku untuk seluruh sektor seperti teknologi informasi, manufaktur, ekspedisi, dan bahkan sektor pariwisata.

Rastegar dkk (2021) menyebutkan bahwa dengan norma baru yang telah terbentuk, pariwisata pasca era COVID-19 harus berubah, tidak lagi kembali kepada status quo, melainkan harus berubah menjadi lebih baik seperti lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan masyarakat lokal, serta lebih memperhatikan keterkaitan antara industri pariwisata, inovasi, dan aspek sosial kemasyarakatan. Perubahan model ini diharapkan menjadi menjadi pemutus mata rantai siklus model pariwisata yang tidak mendukung pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut lagi, Abbas dkk (2021) mengatakan bahwa industri pariwisata pasca COVID-19 harus lebih memperhatikan mengenai tingkat sanitasi mengingat kesadaran masyarakat mengenai aspek hygiene semakin meningkat di era pasca COVID-19. Begitu pula dengan inovasi teknologi. Industri pariwisata sudah harus mulai melakukan transisi dan transformasi model bisnis dengan semakin melibatkan teknologi informasi. Mengingat bahwa pandemi di masa depan tidak mungkin sepenuhnya diberantas, maka pariwisata di masa depan harus terlebih dahulu berinvestasi dalam inisiatif sanitasi dan teknologi informasi berkualitas tinggi.

Seperti halnya di sektor manufaktur dan transportasi, teknologi informasi adalah katalis dalam kemajuan. Untuk sektor pariwisata teknologi informasi merupakan kekuatan utama dalam menciptakan fleksibilitas dalam industri pariwisata (Hall et al., 2020). Pandemi telah membantu mempercepat perubahan teknologi.

Robot, teknologi informasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan dapat mengurangi biaya, meningkatkan likuiditas, dan meningkatkan fleksibilitas. Teknologi juga membantu menjaga implementasi social distancing (Thomas & Chopra, 2020), karena teknologi dapat menghubungkan orang tanpa kontak fisik. Dengan demikian, teknologi dapat menangani masalah khusus pandemi seperti menyaring wisatawan, menemukan kasus COVID-19 dan melacak kontak, membantu wisatawan yang bermaksud untuk menikmati festival budaya melalui fasilitas teknologi informasi dll (Hall et al., 2020).

Dengan pandemi yang tidak mungkin hilang sepenuhnya, serta dalam rangka memitigasi kemungkinan adanya tantangan dari faktor eksternal lainnya di kemudian hari, maka penggunaan teknologi informasi dalam industri pariwisata adalah hal yang tidak dapat di hindari.

Pembangunan teknologi informasi untuk mendukung industri pariwisata memerlukan investasi yang tidak sedikit. Masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun dan diperbaiki untuk meningkatkan pariwisata Bangka Belitung, jika harus ditambahkan investasi di bidang teknologi pariwisata, maka akan semakin memberatkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, McCartney (2020) mengemukakan bahwa Alih-alih menggunakan pendanaan top-down, pendanaan melalui kemitraan antara pemerintah dengan swasta harus digunakan dalam diversifikasi industri pariwisata termasuk pengembangan sektor teknologi informasi.

Dalam jangka panjang, kebijakan yang membantu menopang pertumbuhan jangka panjang harus memprioritaskan sektor korporasi. Mempertahankan dan memelihara industri pariwisata membutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta. Ketika pandemi terjadi, pemerintah sudah harus dengan cermat menganalisis dampak yang dihasilkan pada industri dan merancang strategi baru untuk mengendalikan risiko (Skare dkk, 2021).

Disamping mengenai pendanaan, dukungan dari masyarakat lokal juga merupakan hal yang sangat penting dalam perjalanan pengembangan industri suatu daerah. Terlebih dengan pengalaman COVID-19 dimana adanya larangan bepergian bagi masyarakat luar daerah ataupun luar negeri, maka peran masyarakat lokal menjadi lebih penting untuk tetap menjaga dan menghidupkan sektor pariwisata (Sharma dkk, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa variabel penting yang harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan pariwisata di era post COVID-19.

Menurut penelitian-penelitian tersebut, pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, kolaborasi pemerintah dengan swasta, dan berbasis masyarakat lokal.

Dengan beberapa variabel utama tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memformulasikan, merumuskan dan menerapkan inovasi kebijakan pada sektor pariwisata, serta mengadopsi metodologi baru dalam rangka mengembangkan industri pariwisata Bangka Belitung.

### 3. Metode

Menurut Sugiyono (2004) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Dalam jurnal ini, metode yang digunakan adalah *model-building method* dengan pendekatan deskriptif. Model-building artinya perumusan model kebijakan mengacu pada temuan atas hasil kebijakan yang telah diambil pada masa lalu. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan baru yang lebih relevan dengan kondisi dan potensi risiko kondisi di masa depan. (Shepherd & Roy, 2017). Dalam konteks ini kebijakan masa lalu yang akan dikaji adalah kebijakan pembangunan sektor pariwisata Provinsi Bangka Belitung di masa lalu. Data tersebut kemudian akan dijadikan sebagai dasar pengembangan rekomendasi penentuan kebijakan sektor pariwisata yang berkelanjutan di masa mendatang.

Adapun Pendekatan deskriptif digunakan agar dapat menghasilkan penjabaran terhadap permasalahan isu sosial menjadi lebih alamiah dibandingkan jika penjabaran dilakukan menggunakan angka - angka statistik (Creswell, 2007) dan (Silalahi, 2009). Dalam konteks ini Adapun pendekatan deskriptif adalah penggambaran melalui kata - kata mengenai dampak COVID-19 terhadap pariwisata di Bangka Belitung, kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Daerah agar pariwisata di Bangka Belitung dapat tetap berjalan secara optimal meskipun terdapat pengaruh dan tantangan baik dari eksternal seperti pandemi, bencana alam, dan lain-lain.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa secara umum, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling rentan terdampak apabila terdapat kejadian eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh manusia seperti, bencana alam, perubahan iklim dan wabah penyakit. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk membangun resiliensi sektor pariwisata agar sektor pariwisata tetap *sustainable* dalam menghadapi kejadian eksternal (Becken, 2013). Masih menurut Becken (2013), bahwa resiliensi secara umum adalah ketahanan, kemampuan untuk bangkit, kemampuan adaptasi, dan kemampuan bertransformasi untuk menghadapi tantangan. Dalam konteks ini, maka resiliensi sektor pariwisata adalah kemampuan dan daya tahan sektor pariwisata untuk dapat beradaptasi, bertransformasi, dan bangkit dalam menghadapi tantangan COVID-19.

Lebih lanjut lagi, Twigger-Rose (2011) menyebutkan bahwa resiliensi dapat berarti sebagai berikut:

- a. Resilensi sebagai resistensi, artinya adalah mempersiapkan kondisi bencana. Hal ini akan sangat berguna ketika kondisi bencana seperti pandemi COVID-19 terjadi, karena ketika bencana terjadi, telah tersedia kebijakan antisipatif dalam rangka menghadapi bencana tersebut.
- b. Resiliensi sebagai bangkit kembali, artinya setelah terdapat rencana antisipasi, terdapat optimisme untuk menuju kepada kondisi semula.
- c. Resilensi sebagai adaptasi, artinya bahwa dengan adanya bencana yang ada perlu adanya rencana penyesuaian diri dengan normal baru. menerima bahwa kondisi telah berubah sehingga sudah sewajarnya jika ingin bertahan maka perlu dilakukan penyesuaian.
- d. Resiliensi sebagai transformasi untuk menghadapi ancaman masa depan. Pariwisata adalah sektor yang sangat rentan terhadap bencana, oleh karena itu, tidak hanya bencana COVID-19 yang perlu dipersiapkan, namun demikian perlu dirumuskan kebijakan dalam menghadapi bencana masa depan.

Diantara negara yang telah mengimplementasikan *tourism resilience* diantaranya adalah China dan Hongkong ketika terjadi wabah SARS pada tahun 2002. SARS yang melanda wilayah China dan Hongkong pada saat itu berdampak sangat signifikan pada sektor pariwisata masing-masing negara. Dengan adanya SARS tersebut, China dan Hongkong merubah cara pandang pemerintah China dan Hongkong dalam

merumuskan kebijakan sektor pariwisata. Baraero-Era dan Del Roasiro (2020) dari Institute of Tourism and Hotel Management Philipina menyebutkan bahwa China dan Hongkong mengadopsi strategi multi-level yang berkelanjutan, inklusif, adaptif, dan inovatif. Rencana pemulihan pariwisata juga harus dipusatkan pada solidaritas tindakan dan ketahanan melalui adaptasi dan transformasi yang sistematis.

Para penulis menunjukkan bahwa konsep proaktif membangun resiliensi adalah adaptasi dan transformasi. Resilensi juga harus inklusif, artinya kebijakan tidak hanya mengandalkan segelintir ahli tetapi juga memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat yang berbeda. Ada bervariasi perspektif tentang *tourism resiliency* yang berkaitan dengan konsep adaptasi dan transformasi seperti sebagaimana studi yang dilakukan oleh Dahles & Susilowati (2015) yang mengidentifikasi atribut-atribut pariwisata yang penting untuk dikedepankan adalah yaitu, keberlangsungan lingkungan hidup, adaptasi, dan inovasi (Tyrrell & Johnston, 2008 : 16).

Membangun resiliensi sektor pariwisata menurut Cochrane (2010) adalah membangun sebuah *cyclical system* (sistem siklus) yang meliputi reorganisasi, eksploitasi, konservasi dan destablisasi. Mengacu pada teori membangun siklus resiliensi yang adaptif terhadap kondisi yang ada, maka diperlukan penahapan kebijakan sektor pariwisata di Bangka Belitung mulai dari tahap persiapan dimana fokus kebijakan pemerintah Bangka Belitung adalah melakukan pembangunan infrastruktur. Penahapan kebijakan termaksud juga harus memperhatikan variable utama dalam pengembangan industri pariwisata di era post COVID-19 yang meliputi pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, kolaborasi pemerintah dengan swasta, dan berbasis masyarakat lokal.

Sesuatu dikatarakan memiliki daya tarik wisata menurut (Cooper, 1993) dalam (Suwena, 2010) jika didukung oleh 4 (empat) komponen utama dalam pariwisata atau biasanya dikenal dengan istilah "4A" yaitu: Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Anciliary. Atraksi adalah apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di suatu destinasi. Dapat berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan. Amenitas adalah fasilitas di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran,

toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain sedangkan Anciliary adalah layanan tambahan yang disediakan untuk memberikan kepuasan tambahan wisatawan serta sangat mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, *tourist information*, *travel Agent* dan *stakeholder collaboration* (Pemerintah daerah, investor, masyarakat lokal yang berperan langsung dalam kepariwisataan).

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017 s.d 2022, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan 4A sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Kebijakan	Strategi
Atraksi	Peningkatan pelestarian budaya lokal dan kualitas daya tarik wisata
Aksesibilitas	Peningkatan aksesibilitas pariwisata,
Amenitas	Peningkatan kualitas sarana pariwisata,
Anciliary	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata

Dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun, maka strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Bangka Belitung untuk periode 2017 s.d 2022 perlu sedikit penyesuaian khususnya terkait dengan titik fokus dalam peningkatan aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta pengembangan pelestarian budaya dan daya tarik wisata.

Faktor utama mengapa diperlukan penyesuaian sebagaimana tersebut di atas adalah karena perubahan cara-cara baru masyarakat dalam menjalankan pariwisata di era new-normal. Standar sanitasi dan keamanan yang cukup tinggi menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihan desitinasi wisata.

Menurut Nasrine Khazami dkk (2020) dari School of Management and Business Administration Szent Istvan University, Hungaria, bahwa dengan adanya new-normal era pasca COVID-19, maka diperlukan transformasi kebijakan pariwisata dengan cara memperluas elemen 4A yang semula hanya dapat diakses melalui kehadiran fisik menjadi 4A yang dapat diakses secara virtual dengan mengedepankan infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa membangun resiliensi adalah sebuah *cyclical process*, sebagai Langkah awal maka diperlukan

reorganisasi kebijakan. Reorganisasi kebijakan dapat dilakukan melalui reformulasi 4A yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik melainkan virtual. Sebut saja Atraksi yang tidak saja dapat dinikmati melalui kehadiran fisik melainkan juga dapat dinikmati secara virtual, Aksesibilitas yang tidak hanya berupa infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, melainkan juga jaringan internet, server, maupun fasilitas interkoneksi lainnya. Perluasan fokus menuju digital tourism

Dalam konteks membangun resiliensi. Maka tahapan selanjutnya adalah eksploitasi dan konservasi. Untuk eksploitasi dan konservasi dapat dilakukan optimasi museum, revitaliasi cagar budaya *repackaging* upacara dan pertunjukan seni budaya menjadi suatu hal yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan dapat diakses secara virtual. Sektor industri musik dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) secara perlahan telah berhasil melaksanakan *virtual event* dan sukses, oleh karena itu, kolaborasi Pemerintah dan sektor swasta dalam *repackaging* event dari semula luring menjadi daring adalah hal yang sangat krusial.

Konsep *digital tourism* akan lebih banyak berorientasi pada pendidikan, keadilan lingkungan dan sosial, yang saat ini sedang banyak dibutuhkan dikarenakan memberikan pengalaman baru para wisatawan. Penyedia jasa *digital tourism* perlu mendorong market dengan cara mengubah penawaran produk dan layanan yang diberikan selama ini. Tindakan tersebut dapat menghubungkan, mendukung, dan mengurus seluruh industri pariwisata untuk semua orang keuntungan (Stankov et al., 2020).

*Digital tourism* atau e-tourism merupakan integrasi antara perkembangan teknologi informasi dengan industri pariwisata. Adapun konsep *digital tourism* yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada pelanggan, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses dalam bentuk Telematika (Yanti, 2019).

Tinjauan dan konsep dasar *digital tourism* di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu bentuk konsep yang baru dan masih belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dan pelaku pariwisata. *Digital tourism* masih di lihat sebagai suatu bagian pengembangan sistem yang masih perlu dikaji lebih jauh mengenai fungsi dan manfaat yang akan didapat. Meskipun di lain pihak dalam pengembangan pariwisata penekanan terhadap pemanfaatan internet sebagai media

promosi dan penyebaran informasi sudah sangat luas, namun hal ini tidak di barengi dengan aplikasi internet tersebut sebagai alat penyebaran informasi pariwisata dan tujuan wisata yang dimiliki oleh tiap daerah.

Pada hakekatnya internet memiliki peran yang tidak terpisah dalam perkembangan teknologi, terutama pariwisata. Internet memberikan solusi yang menawarkan kemudahan bagi pengembangan pariwisata. Melalui internet banyak hal bisa di akses secara mudah, serta digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia sehingga informasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dapat dengan mudah juga diakses kapan, dimana dan oleh siapa saja. Pemanfaatan internet di Indonesia pada saat ini telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Komunikasi yang dilakukan telah memasuki wilayah pedesaan. Dan teknologi pendukung salah satunya adalah penggunaan handphone sebagai alat komunikasi. Sehingga hubungan antara internet dan handphone sebagai alat komunikasi sangat besar untuk dapat dikembangkan didalam suatu model aplikasi yang bermanfaat bagi semua orang dan industri.

Perluasan fokus pariwisata dengan megembangkan *digital tourism* tidak berarti menghilangkan pariwisata yang masih memerlukan kehadiran fisik. Mengacu pada hasil penelitian Kusumaningrum & Wachyuni (2020) bahwa dari 100 orang yang disurvei terkait dengan motivasi melakukan perjalanan pariwisata setelah selesainya COVID-19, mayoritas responden menyatakan bahwa motivasi terbesar melakukan pariwisata didominasi oleh motivasi fisik atau fisiologis dan diikuti oleh motivasi interpersonal, sehingga pariwisata yang memerlukan kehadiran fisik masih memiliki market yang cukup besar di era post COVID-19.

Dengan perluasan fokus pariwisata ke arah *digital tourism*, maka revitalisasi sektor teknologi informasi menjadi vital. Tentunya revitalisasi sektor teknologi informasi juga tidak hanya akan berguna untuk saat ini saja, melainkan juga untuk mengantisipasi disrupsi teknologi di masa mendatang yang akan berpotensi merubah perilaku manusia di kemudian hari. Revitalisasi sektor teknologi informasi akan menjadi investasi bagi Pemerintah Bangka Belitung untuk menghadapi perubahan dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan konsep resiliensi yang telah disebutkan di awal bahwa resiliensi juga berarti resistensi yang artinya adalah persiapan untuk menghadapi kondisi di masa depan.

Revitalisasi sektor teknologi sebagaimana disebutkan di atas harus disertai dengan *upgrading*

sumber daya manusia yang akan mengoperasikan teknologi. Karena teknologi informasi hanyalah sebuah *tools*. Pada akhirnya semua akan dijalankan oleh manusia. Sehingga sumber daya manusia yang mumpuni juga tidak kalah pentingnya dengan teknologi informasi itu sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa Bangka Belitung memiliki potensi wisata yang lengkap meliputi wisata budaya, wisata alam, dan wisata budaya. Potensi wisata yang dimiliki oleh Bangka Belitung menawarkan pilihan yang memungkinkan untuk implementasi *digital tourism* sehingga dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi Bangka Belitung di era post COVID-19.

Oleh karena itu, masa transisi sebagaimana tersebut di atas merupakan sebuah momentum untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan mendasar yang diperlukan dalam rangka membangun pariwisata Bangka Belitung yang berkelanjutan. Disamping itu, masa transisi juga sangat bermanfaat untuk penganggaran dalam RPJMD untuk urusan pariwisata dan budaya juga agar dapat efektif efisien dan tepat sasaran.

Untuk memberikan pendalaman terhadap usulan perluasan fokus pariwisata Bangka Belitung menuju *digital tourism*, dilakukan analisa dengan menggunakan metode SWOT sebagai berikut :

3. ketertarikan masyarakat terhadap event virtual menjadikan peluang berkembangnya <i>digital tourism</i>	dan minimnya masyarakat lokal mengenai <i>digital tourism</i>
---	---

Berdasarkan pemetaan SWOT sebagaimana tersebut di atas serta mempertimbangkan bahwa kriteria utama pembangunan pariwisata berkelanjutan yang meliputi unsur ramah lingkungan, berbasis teknologi, kolaborasi pemerintah dengan swasta, dan berbasis masyarakat lokal, maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut.

Strategi Strength - Opportunity (Strategi S - O)	Strategi Weakness - Opportunity (Strategi W - O)
Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang  1. Peningkatan jumlah destinasi wisata dan budaya lokal serta revitalisasi situs budaya sehingga dapat dinikmati secara virtual. 2. Peningkatan sarana pariwisata yang sejalan dengan road map kemajuan teknologi	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang  1. Pengembangan kompetensi sumber daya pariwisata. 2. Reformasi birokrasi di internal Pemerintah Bangka Belitung
Strategi Strength - Threat (Strategi S - T)	Strategi Weakness - Threat (Strategi W - T)
Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman 1. Peningkatan keterlebitan masyarakat lokal. 2. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.	Strategi yang meminimalkan Kelemahan untuk menghindari ancaman 1. peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai bagian dari lembaga pariwisata 2. peningkatan kualitas pemasaran pariwisata yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi

Perluasan fokus kebijakan pariwisata menuju *digital tourism* memberikan harapan yang cukup baik untuk membangun resiliensi industri pariwisata Bangka Belitung mengingat perluasan fokus menuju *digital tourism* akan memberikan ruang diversifikasi pembangunan pariwisata dan menghadirkan tawaran pengalaman baru bagi para wisatawan untuk menikmati destinasi wisata

Strength	Weakness
1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki situs budaya dan atraksi yang potensial dan cocok untuk menggunakan pendekatan <i>digital tourism</i> . 2. Platform digital yang semakin maju dalam mendukung <i>digital tourism</i> . 3. Transisi kebijakan memberikan waktu persiapan untuk pengembangan pariwisata untuk mendatang	1. Birokrasi dan administrasi pemerintahan yang dapat memakan waktu cukup lama 2. Terbatasnya SDM ASN dalam operasional <i>digital tourism</i>
Opportunity	Threat
1. Disrupsi teknologi informasi yang akan mempercepat perkembangan <i>digital tourism</i> 2. Semakin tingginya jumlah pengguna internet membuka peluang market untuk <i>digital Tourism</i>	1. Potensi tidak tercapainya keberlanjutan kebijakan karena pergantian pejabat yang berwenang 2. Terbatasnya APBD dalam pelaksanaan kebijakan ini 3. Kurangnya kesadaran

dengan cara yang berbeda, sementara kelemahan dan ancamannya masih dapat dimitigasi.

Sebagai pembanding, di bawah ini juga akan disajikan keuntungan dan kelemahan kebijakan pariwisata yang mempertimbangkan *digital tourism* jika dibandingkan dengan kebijakan eksisting yang saat ini tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

	Kebijakan Eksisting	Pariwisata dengan Digital Tourism
<b>Keuntungan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>business as usual</i> sehingga tidak terdapat kompleksitas baru.</li> <li>2. Program kegiatan menyesuaikan dengan tahun sebelumnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptif terhadap situasi</li> <li>2. Relevan dengan kondisi saat ini.</li> <li>3. Implementatif</li> <li>4. memberikan nilai tambah optimal dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah</li> </ol>
<b>Kelemahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang adaptif terhadap situasi</li> <li>2. Tidak relevan dengan kondisi saat ini.</li> <li>3. Tidak dapat diimplementasikan</li> <li>4. Tidak dapat memberikan nilai tambah dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah</li> <li>5. Saat ini peranan pemerintah masih minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi memakan waktu lebih lama</li> <li>2. Terbatasnya SDM ASN</li> <li>3. Staging program sensitif terhadap waktu</li> </ol>

Disamping memberikan harapan yang cukup baik sesuai analisis SWOT sebagaimana tersebut di atas, transformasi kebijakan dengan memperluas fokus pariwisata menuju *digital tourism* juga memiliki keuntungan lebih banyak dan kelemahan lebih sedikit jika dibandingkan dengan implementasi strategi pariwisata eksisting yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Bangka Belitung pada masa lalu.

Lebih lanjut lagi untuk memperkuat ketahanan pariwisata di era Post COVID-19, Nazrine Khazami dkk (2020) menyarankan bahwa dalam rangka pemulihan sektor pariwisata di era transisi COVID-19 diperlukan langkah-langkah yang lebih nyata diantaranya (i) semakin gencar dan fokus mempromosikan *culture-based tourism*, (ii) sinergi sektor pariwisata dengan sektor teknologi

informasi (iii) peningkatan sinergi antara Pemerintah dengan Swasta (iv) semakin fokus dalam membangun *sustainable and safe tourism* (vi) edukasi dan asistensi masyarakat lokal agar dapat mendukung pariwisata setempat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka membangun *tourism business environment* menuju *sustainable tourism business*.

Untuk melengkapi *policy paper*, implemenasi *staging* kebijakan perlu dilengkapi dengan *timeline*, sehingga akan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai implementasi kebijakan *staging* tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat fokus untuk 3 (tiga) tahun kedepan untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur digital, penyiapan destinasi wisata agar dapat dinikmati juga secara digital, serta upgrading kapasitas masyarakat lokal untuk agar dapat mengejar ketertinggalan perkembangan teknologi informasi. revitalisasi teknologi informasi juga harus mempertimbangkan kebijakan penganggaran di Pemerintah Provinsi Kepulauan Belitung sehingga pembangunan industri pariwisata ini efektif dan efisien secara anggaran. Untuk 3 (tiga) tahun berikutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat melakukan promosi, optimasi, dan ekspliotasi destinasi wisata yang telah dibangun dan dilengkapi dengan nilai tambah teknologi informasi.

## 5. Kesimpulan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19 Hal ini mengakibatkan perlambatan ekonomi baik nasional maupun regional, termasuk ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mempertimbangkan bahwa pariwisata merupakan sektor utama penopang ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan suatu kebijakan *sustainable tourism* untuk membangun resiliensi pariwisata di Provinsi Bangka Belitung.

Indikator utama *sustainable tourism* adalah pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, kolaborasi pemerintah dengan swasta, dan berbasis masyarakat lokal. Oleh karena itu dalam hal akan dirumuskan kebijakan *sustainable tourism*, maka kebijakan tersebut harus ramah lingkungan, berbasis teknologi, kolaborasi pemerintah dengan swasta, dan berbasis masyarakat lokal.

New-normal era pasca COVID-19 yang mempercepat disrupsi teknologi informasi mau tidak mau juga mempengaruhi sektor pariwisata

sehingga terwujudlah *digital tourism* dimana menjadikan pariwisata tidak terbatas ruang dan jarak, serta memberikan pengalaman baru sektor pariwisata. Dengan perluasan fokus pariwisata ke arah *digital tourism*, maka revitalisasi sektor teknologi informasi menjadi vital. Tentunya revitalisasi sektor teknologi informasi juga tidak hanya akan berguna untuk saat ini saja, melainkan juga untuk mengantisipasi disrupsi teknologi di masa mendatang yang akan berpotensi merubah perilaku manusia di kemudian hari. Revitalisasi sektor teknologi informasi akan menjadi investasi bagi Pemerintah Bangka Belitung untuk menghadapi perubahan dikemudian hari

Revitalisasi sektor teknologi sebagaimana disebutkan di atas harus disertai dengan upgrading sumber daya manusia yang akan mengoperasikan teknologi. Karena teknologi informasi hanyalah sebuah tools. Pada akhirnya semua akan dijalankan oleh manusia. Sehingga sumber daya manusia yang mumpuni juga tidak kalah pentingnya dengan teknologi informasi itu sendiri.

Berdasarkan beberapa indikator mengenai *sustainable tourism* yang berbasis digital tourism, maka untuk membangun resiliensi pariwisata Bangka Belitung kebijakan yang dapat diusulkan adalah (i) Peningkatan jumlah destinasi wisata dan budaya lokal serta revitalisasi situs budaya sehingga dapat dinikmati secara virtual. (ii) Peningkatan sarana pariwisata yang sejalan dengan road map kemajuan teknologi (iii) Pengembangan kompetensi sumber daya pariwisata (iv) Reformasi birokrasi di internal Pemerintah Bangka Belitung (v) Peningkatan keterlebitan masyarakat lokal (vi) Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (vii) peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai bagian dari lembaga pariwisata; dan (viii) peningkatan kualitas pemasaran pariwisata yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

## 6. Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Abbas, J.; Mubeen, R.; Iorember, P.T.; Raza, S.; Mamirkulova, . 2021. *Exploring the Impact of COVID-19 on Tourism: Transformational Potential and Implications for a Sustainable Recovery of the Travel and Leisure Industry*. Current Research in Behavioural Science volume 2,
- Assaf, A.; Scuderi, R. .2020. *COVID-19 and the Recovery of the Tourism Industry*. Tourism Economic Journal volume 26, 731–733.

Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2005. *Pedoman Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah*.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga. 2017. *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017 s.d 2022*

Fakultas Pertanian Unsri dan Bappeda Kabupaten Musi Rawas. 2004. *Studi Pengembangan "Ecotourism" di kawasan TNKS Kabupaten Musi Rawas*, Laporan Akhir.

McCartney, G. 2020. *The Impact of the Coronavirus Outbreak on Macao. From Tourism Lockdown to Tourism Recovery*. Current Issues on Tourism Journal, 1–10.

Nyoman S. Pendit. 2006. *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Prajogo, M.J. 1976. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pariwisata

Rastegar, R.; Higgins-Desbiolles, F.; Ruhanen, L. 2021. *COVID-19 and a Justice Framework to Guide Tourism Recovery*. Annual of Tourism Research Volume 91, 103161.

Sharma, G.D.; Thomas, A.; Paul, J. 2021. *Reviving Tourism Industry Post-COVID-19: A Resilience-Based Framework*. Tourism. Management. Perspective Volume 37, 100786.

Shepherd, Dean A. dan Suddaby Roy. 2017. *Theory Building: A Review and Integration*. Journal of Management 43(1):59–86

Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Spillane, J James. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius

Spillane, James. 1994. *Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kanisius,

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Villacé-Molinero, T.; Fernández-Muñoz, J.J.; Orea-Giner, A.; Fuentes-Moraleda, L. 2021. *Understanding the New Post-COVID-19 Risk Scenario: Outlooks and Challenges for a New Era of Tourism*. Tourism Management Volume 86, 104324.

Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta : ANDI

Yanti, Dewi. 2019. *Analisis Strategi Pengembangan Digital Tourism sebagai Promosi Pariwisata di Toba Samosir*. Jurnal Darma Agung Volume XXVII, Nomor 1, April 2019: 814 – 821

Yoeti, Oka A, 1990. *Pemasaran Pariwisata*, Bandung: Angkasa

Internet

<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>

<https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-februari-2022>

**KAMIKAWA****Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Inovasi**Website jurnal : <https://journal.babelprov.go.id/index.php/kamikawa/index>**POLICY PAPER****Potensi Unggulan Kabupaten Bangka Selatan Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perencanaan Tahun 2023*****Leading Potential Of Bangka Selatan Regency Before And During The Covid-19 Pandemic In Planning Perspective In 2023*****Yuliani, Y<sup>1\*</sup>**<sup>1</sup>*Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**\*yulianiinopi@gmail.com***ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan potensi unggulan daerahnya. Pandemi COVID-19 yang sempat melanda dunia pada awal Tahun 2020 menimbulkan dampak multisektoral, termasuk didalamnya mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menentukan sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Bangka Selatan pada saat sebelum dan ketika terjadi pandemi COVID-19 dengan menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari data PDRB. Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan mulai Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Location Question* (LQ). Dengan metode ini didapat bahwa sektor basis di Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebelum dan ketika pandemi COVID-19 adalah sama yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian.

**Kata kunci: Bangka Selatan, Sektor Basis, Sektor Unggulan, LQ.****ABSTRACT**

*Economic growth is one indicator of the success of development. Regional governments in increasing regional economic growth have to pay attention to the superior potential of their regions. The COVID-19 pandemic hit the world at the beginning of 2020 had a multi-sectoral impact, including disrupting regional economic growth. This paper aims to determine the basic sector or leading sector in South Bangka Regency before and during the COVID-19 pandemic by using secondary data published by the dari Badan Pusat Statistik (BPS) the data consists of GRDP data by Field of Business at Constant Prices since 2017 to 2021. The analytical method used is the Location Question (LQ) method. The result of this study is the base sector in South Bangka Regency in the period 2017 to 2021 before and during the COVID-19 pandemic was the same, the agriculture, forestry, and fishery sectors and the mining and quarrying sector.*

**Keywords: South Bangka, Basic Sectors, Superior Sectors, LQ.**

## 1. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 telah dimulai sejak Desember Tahun 2021. Proses pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan proses pembangunan nasional. Pencapaian tujuan pembangunan nasional tidak terlepas dari kontribusi keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam upaya mendukung prioritas nasional melakukan sinergitas kebijakan. Pemerintah Daerah provinsi melakukan sinergitas terhadap prioritas nasional melalui program, kegiatan dan sub kegiatan, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan sinergitas kebijakan terhadap Prioritas Nasional dan sinkronisasi terhadap prioritas daerah provinsi. Demikian juga halnya dengan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, selain melakukan sinergitas terhadap Prioritas Nasional, juga melakukan sinkronisasi terhadap prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebagai upaya membangun daerah yang merupakan satu kesatuan dengan provinsi dan nasional.

Sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah mengalami tekanan. Muncul krisis kesehatan sebagai pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi ini terjadi secara global, bersifat *unprecedented shock* dan belum ada negara yang berpengalaman dalam menanggulangnya. Berbagai kebijakan pengendalian secara komprehensif terus dilakukan oleh Pemerintah. Kebijakan yang disusun bertujuan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Selain itu juga untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah. Masih dalam kondisi pandemi yang belum seutuhnya mereda, sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19 tema pembangunan Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema pembangunan ini menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Penyakit COVID-19 yang mewabah di Wuhan Tiongkok muncul di penghujung Tahun 2019 dan menjadi pandemi di banyak negara. Penyakit menular yang baru ditemukan ini disebabkan oleh jenis *coronavirus*, yaitu suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Di Indonesia, kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, terdapat dua orang yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hingga tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di mana provinsi paling terpapar adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Bangka Belitung sendiri kasus pertama ditemukan pada tanggal 30 Maret 2020 dan merupakan provinsi ke-31 yang terpapar.

Per 1 Agustus 2020, jumlah kasus terpapar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 193 orang dan meninggal 2 orang hingga akhir Desember 2021 jumlah kasus meningkat menjadi 52.359 orang dan meninggal sebanyak 1.462 orang. Kabupaten Bangka Selatan sendiri merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kasus terkonfirmasi positif terendah namun tingkat kematiannya tertinggi.

Tabel 1. Jumlah Kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Tahun 2021

Daerah	Positif	Meninggal	Positif	Meninggal	%
	1 Agustus 2020		31 Desember 2021		
Bangka	61	-	9,841	364	3.70%
Belitung	19	-	7,784	233	2.99%
Bangka Barat	22	-	5,641	141	2.50%
Bangka Tengah	17	-	6,626	181	2.73%
Bangka Selatan	9	1	3,499	153	4,37%
Belitung Timur	12	-	5.328	92	1,73%
Pangkalpinang	53	1	13.640	298	2,18%
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	193	2	52.359	1.462	2,79%
Nasional	3.440.396	95.723	4.262.720	144.094	3,38%

Sumber: Web SATGAS COVID-19 PUSDALOPS BPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

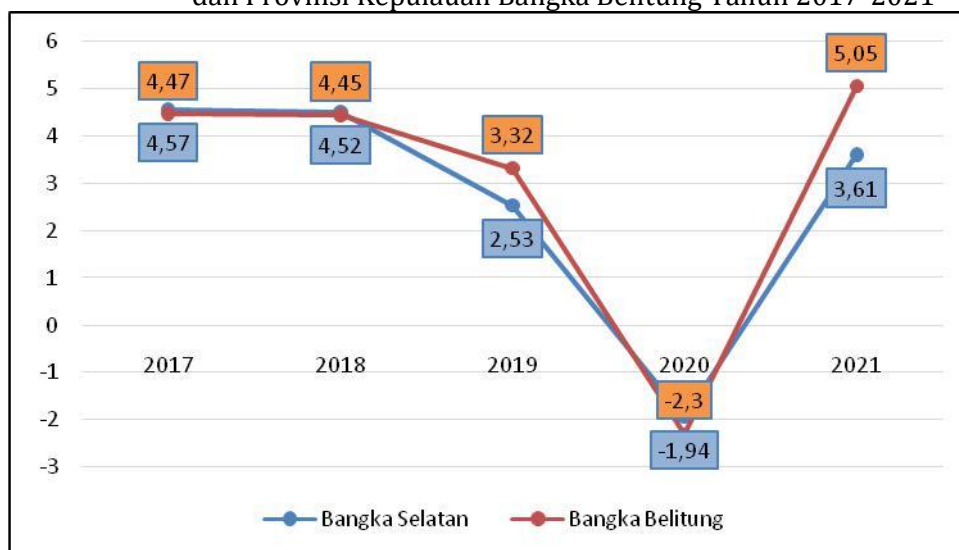
Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 beberapa upaya pencegahan penularan dilakukan antara lain melalui karantina wilayah atau dikenal dengan *lockdown*, hingga diatur melalui pembatasan sosial skala besar (PSBB). Transportasi udara sebagian besar dihentikan, demikian juga dengan transportasi darat dan laut. Adanya PSBB menyebabkan pergerakan manusia terhambat yang tentu saja berdampak pada sector perekonomian.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah adalah tercapainya target indikator makro yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu dalam Rencana Kerja Pemerintah dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain penyerapan tenaga kerja dan inflasi, salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi (Tri Widodo, 2006). Merujuk pada dokumen tahunan rencana pemerintah, beberapa indikator makro yang menjadi target sasaran yang harus dicapai adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, *Gini Ratio*, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimulai dari penentuan kegiatan perencanaan ekonomi untuk pengembangan sector kegiatan ekonomi, dengan melakukan proses identifikasi sector unggulan atau potensial ekonomi daerah. Informasi mengenai sector unggulan atau potensi ekonomi

daerah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada Tahun 2021, perekonomian Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,61%. Pertumbuhan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan factor produksi akibat pulihnya perekonomian setelah sebelumnya pada Tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 1,94%, sebagaimana diketahui kondisi ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang muncul pada awal Tahun 2020. Meskipun masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh sebesar 5,05%, perekonomian Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat dibandingkan Tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu sebesar 2,53%.

Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021



Sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019, PDRB Kabupaten Bangka Selatan terus mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada Tahun 2021. Selama kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2021, struktur perekonomian Kabupaten Bangka Selatan menurut lapangan usaha didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami fluktuasi, kontribusi pada Tahun 2017

sebesar 36,86persen, Tahun 2018 menurun menjadi 35,45persen dan selanjutnya Tahun 2019 hingga Tahun 2020 terus meningkat yaitu 35,77persen dan 41,64persen. Namun pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi 40,24persen.

Salah satu penyebab kondisi ini adalah harga komoditas strategis perkebunan yang mengalami fluktuasi seperti karet, lada, dan kelapa sawit. Untuk lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 kontribusi sector ini sebesar 22,63 persen dan terus menurun hingga Tahun 2021 menjadi 17,94 persen.

Tabel2. Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2021 Menurut Lapangan Usaha

	SEKTOR	PDRB ADHK TAHUN (JUTA RUPIAH)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,061,136.00	2,196,006.00	2,281,766.54	2,499,181.70	2,503,754.58
B	Pertambangan dan Penggalian	1,569,113.00	1,528,588.00	1,508,870.45	1,223,390.52	1,321,951.65
C	Industri Pengolahan	243,248.00	270,177.00	263,885.50	280,636.66	294,016.58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,206.00	3,399.00	3,826.20	4,106.73	4,336.02
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,008.00	978.00	1,017.14	996.57	1,028.16
F	Konstruksi	431,058.00	468,108.00	490,033.69	478,021.26	494,034.98

	SEKTOR	PDRB ADHK TAHUN (JUTA RUPIAH)				
		2017	2018	2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	596,132.00	624,488.00	637,118.26	591,799.60	622,104.17
H	Transportasi dan Pergudangan	42,867.00	46,175.00	48,085.96	43,239.36	47,219.45
I	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	104,624.00	110,705.00	121,523.55	120,685.57	132,570.61
J	Informasi dan Komunikasi	34,208.00	36,597.00	41,959.17	48,177.35	52,204.97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,040.00	29,877.00	30,875.77	29,751.92	31,807.60
L	Real Estate	174,244.00	189,108.00	193,133.34	194,828.87	202,992.19
M,N	Jasa Perusahaan	7,195.00	7,822.00	7,983.51	7,118.08	7,343.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	285,838.00	314,460.00	334,435.97	324,424.50	339,972.08
P	Jasa Pendidikan	128,679.00	140,865.00	149,681.05	148,583.81	152,224.12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,416.00	36,463.00	39,973.25	40,391.48	45,795.86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	18,859.00	20,389.00	22,675.24	21,703.09	22,197.92
	PDRB	5,763,871.00	6,024,205.00	6,176,844.59	6,057,037.07	6,275,554.66

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Selatan

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 yang dihitung dari pertumbuhan PDRB ADHK mengalami kontraksi sebesar 2,30 persen. Namun, pada Tahun 2021, berhasil bangkit dan tumbuh menjadi sebesar 5,05 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha penyusun perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun 2017 hingga Tahun 2021, struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Pertambangan dan Penggalian. Selama kurun waktu tersebut juga kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peringkat saling susul. Pada Tahun 2017-2019, didominasi oleh Industri Pengolahan, sedangkan pada Tahun 2020 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menduduki posisi pertama. Selanjutnya pada Tahun 2021, kembali Industri Pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada Tahun 2017, kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,81 persen terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya hingga tahun 2019 terusturun menjadi sebesar 17,93 persen. Pada Tahun 2020, dimana pandemi Covid-19 sedang melanda, kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan menjadi sebesar 20,46 persen. Meningkatnya kontribusi ini selain disebabkan beberapa lapangan usaha lain mengalami terkontraksi sebagai dampak pandemi, juga disebabkan karena peningkatan produksi. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan perikanan untuk mendorong pemulihan ekonomi ketika pandemi Covid-19 mewabah. Selanjutnya pada Tahun 2021, kontribusi sektor ini mengalami penurunan menjadi sebesar 19,66 persen. Sedangkan, untuk lapangan usaha Industri Pengolahan, selama kurun waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan dari 20,60 persen pada Tahun 2018 menjadi sebesar 18,75 persen pada Tahun 2020. Namun pada Tahun 2021 kontribusi sektor ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kontribusi sebesar 20,86 persen.

Tabel 3. Perkembangan PDB (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 Menurut Lapangan Usaha

	SEKTOR	PDB ADHK TAHUN (JUTA RUPIAH)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,095,694.37	9,589,715.39	9,862,829.89	10,675,203.07	10,783,815.63
B	Pertambangan dan Pengalihan	6,634,751.71	6,571,473.48	6,632,665.76	6,034,554.36	6,443,579.35
C	Industri Pengolahan	11,337,679.96	11,787,736.60	11,928,979.01	11,257,430.58	11,870,051.11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45,863.78	49,272.85	52,509.76	55,270.16	61,027.84
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,405.78	8,898.92	9,201.84	9,716.43	10,195.34
F	Konstruksi	4,248,461.28	4,492,351.97	4,809,789.39	4,695,262.32	4,897,577.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,253,256.81	7,444,846.85	7,579,733.89	7,235,550.61	7,654,124.16
H	Transportasi dan Pergudangan	1,892,222.14	2,020,716.92	2,065,711.63	1,720,829.03	1,871,546.24
I	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	1,136,527.50	1,207,035.07	1,318,707.21	1,279,780.48	1,415,754.10
J	Informasi dan Komunikasi	1,002,848.85	1,109,942.72	1,257,862.24	1,445,179.86	1,572,265.18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	881,272.84	941,026.64	987,800.35	921,441.76	972,780.24
L	Real Estate	1,572,153.73	1,702,444.88	1,726,902.17	1,807,003.57	1,928,668.73
M,N	Jasa Perusahaan	127,461.59	135,945.68	137,618.73	118,677.75	125,504.53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,604,173.19	2,843,627.04	3,072,679.79	2,977,142.81	3,140,143.26
P	Jasa Pendidikan	1,183,251.72	1,289,160.46	1,380,491.05	1,369,372.01	1,402,512.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605,202.41	632,755.12	697,143.33	704,772.07	804,542.57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	354,926.01	381,084.91	421,275.66	392,021.83	406,648.50
	PDRB	49,985,153.67	52,208,035.50	53,941,901.70	52,699,208.70	55,360,736.62

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berkaitan dengan hal tersebut, informasi mengenai potensi unggulan Kabupaten Bangka Selatan menjadi sangat penting bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan strategi perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini disusun untuk memberikan

gambaran mengenai potensi unggulan daerah Kabupaten Bangka Selatan pada saat pandemi COVID-19 mewabah dan pascapandemi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pada Tahun 2023.

## 2. Kajian Pustaka

### Definisi PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi yang dimiliki residen atau non-residen [BPS]. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu factor penting dalam pembangunan. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan produksi riil tanpa dipengaruhi inflasi. Perekonomian mengalami ekspansi jika ada pertumbuhan positif dan mengalami kontraksi jika pertumbuhannya negatif. Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi telah dikembangkan oleh para ahli antara lain teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Robert M Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W. Swan (1956) dari Australia. Teori ini selanjutnya dikenal dengan model Solow-Swan, menggunakan unsure pertumbuhan penduduk, akumulasi

kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas per kapita meningkat (Robinson Tarigan 2019). Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu, sehingga fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_i = F_i(K, L, t)$$

dimana:

$Y_i$  : besarnya output

$K$  : *Kapital* (Modal)

$L$  : *Labor* (Tenaga Kerja)

### Teori Basis

Pada Tahun 1659, seorang Belanda, Pieter De la Court (1618-1685) mengemukakan teori tentang *The Economic Base*. Menurut De la Court kekayaan Leiden merupakan hasil langsung industri yang berorientasi ekspor dari kota tersebut, Universitas Leiden dan industri manufacturing. Disebutkan pula bahwa sumber daya financial yang mengalir dari luar negeri ke kota tersebut mampu meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (dalam Pieter Noisirifan de FRETES 2018).

Teori basis ekonomi (*The Economic Base*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Robinson Tarigan 2019). Dalam pengertian ekonomi regional, istilah ekspor didefinisikan sebagai menjual produk/jasa keluar wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk ekspor jika terdapat tenaga kerja yang berdomisili di wilayah tersebut bekerja di wilayah lain dan memperoleh penghasilan. Pada dasarnya kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang mendatangkan pendapatan/uang dari luar wilayah baik dari penghasil produk /barang maupun penyedia jasa dan disebut sebagai kegiatan/ sektor basis.

Semua kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan basis disebut kegiatan/sektor non basis. Sektor non basis sifatnya hanya memenuhi kebutuhan lokal, perkembangannya tidak melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, sektor yang mampu meningkatkan perekonomian wilayah adalah sektor basis (Robinson Tarigan 2019).

### 3. Metode

Analisis data kajian ini menggunakan metode *Location Question* (LQ). *Location Question* (LQ) yang merupakan salah satu metode untuk melihat potensi ekonomi suatu daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dimana data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan periode Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Metode LQ membandingkan lapangan kerja/nilai tambah sektor tertentu dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah sektor yang sama secara nasional (Robinson Tarigan, 2019). Secara umum metode analisis LQ dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{V_{ik}}{V_k}}{\frac{V_{ip}}{V_p}}$$

- $V_{ik}$  : Nilai output (PDRB) sektor daerah i studi k (dalam hal ini Kabupaten Bangka Selatan) dalam PDRB daerah studi i
- $V_k$  : PDRB total semua sektor di daerah studi k (dalam hal ini Kabupaten Bangka Selatan)
- $V_{ip}$  : Nilai output (PDRB) sektori daerah referensi (dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dalam PDRB daerah referensi p
- $V_p$  : PDRB total semua sektor di daerah referensi p (dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Berdasarkan formulasi di atas, maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dihasilkan yaitu (Bendavid-Val, 1997:174 dalam Tri Widodo 2006):

1. Nilai LQ di sektori=1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektori di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan

sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p;

2. Nilai LQ di sektor > 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektori di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sector i merupakan sector unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah-daerah studi k; dan
3. Nilai LQ di sektor < 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektori di daerah k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sector i bukan merupakan sector unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Potensi unggulan daerah Kabupaten Bangka Selatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dihitung melalui metode LQ dengan membandingkan PDRB Kabupaten Bangka Selatan dengan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengolahan data PDRB Atas

Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2021 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2017-2021 menghasilkan nilai LQ sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai LQ Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha		LQ = (qi/qr)(Qi/Qn)						Nilai LQ	Kategori Sektor
		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.97	1.98	2.02	2.04	2.05	2.00	>1	Unggulan
B	Pertambangan dan Penggalian	2.05	2.02	1.99	1.76	1.81	1.94	>1	Unggulan
C	Industri Pengolahan	0.19	0.20	0.19	0.22	0.22	0.20	<1	Bukan Unggulan
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.61	0.60	0.64	0.65	0.63	0.62	<1	Bukan Unggulan
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.93	0.95	0.97	0.89	0.89	0.93	<1	Bukan Unggulan
F	Konstruksi	0.88	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	<1	Bukan Unggulan
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.71	0.73	0.73	0.71	0.72	0.72	<1	Bukan Unggulan
H	Transportasi dan Pergudangan	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.21	<1	Bukan Unggulan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.80	0.79	0.80	0.82	0.83	0.80	<1	Bukan Unggulan
J	Informasi dan Komunikasi	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	<1	Bukan Unggulan
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.28	<1	Bukan Unggulan
L	Real Estat	0.96	0.96	0.98	0.94	0.93	0.95	<1	Bukan Unggulan
M,N	Jasa Perusahaan	0.49	0.50	0.51	0.52	0.52	0.50	<1	Bukan Unggulan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	<1	Bukan Unggulan
P	Jasa Pendidikan	0.94	0.95	0.95	0.94	0.96	0.95	<1	Bukan Unggulan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	<1	Bukan Unggulan
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	<1	Bukan Unggulan
Produk Domestik Regional Bruto		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

Dari hasil perhitungan nilai LQ di atas didapat bahwa:

1. Terdapat 2 (dua) sector dengan rata-rata LQ >1 yaitu sector pertanian, perikanan, dan kehutanan (2) dan sector pertambangan dan penggalian (1,94).
2. Selebihnya sebanyak 15 sektor memiliki nilai rata-rata LQ <1.

Dengan melihat rata-rata nilai LQ, dapat diidentifikasi sektor-sektor yang

merupakan sektor basis atau sektor unggulannya itu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dan sector pertambangan dan penggalian dengan rata-rata nilai LQ masing-masing sebesar 2 dan 1,94. Kedua sektor ini merupakan sektor yang memiliki keunggulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah Kabupaten Bangka Selatan serta mempunyai potensi untuk diekspor ke daerah di luar daerah.

Interpretasi untuk sektor basis atau unggulan tersebut sebagai berikut:

- a) Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan rata-rata  $LQ = 2$  menunjukkan bahwa secara teoritis sebanyak 50 persen hasil sektor ini dapat diekspor dan sisanya 50 persen dapat dikonsumsi daerah sendiri.
- b) Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata  $LQ = 1,94$  artinya secara teoritis sebanyak 48,45 persen hasil sektor ini dapat diekspor dan sisanya 51,55 persen dapat dikonsumsi daerah sendiri.

Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan sector Pertambangan dan Penggalian yang merupakan sector unggulan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan hasil pengolahan data, selama masa pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Nilai  $LQ$  masing-masing sektor ini justru meningkat dari Tahun 2019 sebelum pandemik terjadi.

Sektor unggulan ini terutama sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang terus meningkat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu terus ditingkatkan. Sedangkan, sektor Pertambangan dan Penggalian yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, semakin lama tentu saja akan semakin berkurang. Hal ini juga merupakan upaya untuk mencapai misi pertama pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian, perikanan dan pariwisata secara kreatif dan inovatif dengan penyediaan infrastruktur yang handal.

Merujuk pada dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023, seluruh produksi tanaman pangan yang terdiri dari padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan pada Tahun 2021 menurun dibandingkan pada Tahun 2020.

Tabel5. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2021

No	Tahun	ProduksiPadi (ton)	ProduksiSayuran (ton)	ProduksiBuah-Buahan (ton)
1	2017	19.274,32	820	10.095,00
2	2018	34.369,00	1.158,99	8.923,05
3	2019	12.883,77	1.201,50	9.054,00
4	2020	29.248,15	1.251,46	9.068,39
5	2021	26.381,49	293,89	2.947,63

Sumber: Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

Dibandingkan Tahun 2020, pada Tahun 2021 produksi tanaman padi menurun sebanyak 2.866,66 ton, sayuran menurun sebanyak 957,57 ton, dan buah-buahan menurun sebanyak 6.120,76 ton. Luas areal panen tanaman padi juga menurun dari 8.215,77 ha menjadi 6.646,50 ha. Menurunnya produksi tanaman padi disebabkan oleh organisme perusak tanaman, bencana kekeringan, dan banjir.

Produksi komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Bangka Selatan Pada Tahun 2021 yang terdiri dari lada, karet dan kelapa sawit mengalami fluktuasi sejak Tahun 2017, namun cenderung meningkat kecuali lada yang mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2017.

Tabel 5. Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2021

No	Tahun	Produksi Lada (ton)	Produksi Karet (ton)	Produksi Kelapa Sawit (ton)
1	2017	17.009,30	12.896,62	30.431,84
2	2018	14.859,48	11.897,52	39.429,38
3	2019	12.358,64	12.803,52	39.315,00
4	2020	15.310,03	11.517,59	40.016,09
5	2021	14.590,59	11.546,14	44.436,82

Sumber: Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

Kondisi ini disebabkan adanya organisme pengganggu tanaman, alih fungsi lahan, tanaman rusak, dan tanaman belum menghasilkan. Produksi kelapa sawit terus meningkat setiap tahunnya dan menunjukkan tren positif. Sedangkan, lada yang merupakan komoditas unggulan dan ciri khas daerah mengalami penurunan.

Sub sector perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya merupakan sektor yang cukup potensial dan dapat diandalkan di Kabupaten Bangka Selatan. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dikelilingi dan

berbatasan langsung dengan laut, memiliki sumber daya laut yang relatif besar dan sangat potensial untuk dikembangkan. Sub sector perikanan juga merupakan mata pencaharian penduduk terbanyak kedua setelah pertanian. Sejak Tahun 2017, produksi perikanan selalu mengalami peningkatan.

Tabel 6. Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017-2021

No	Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Produksi Pengolahan Perikanan (ton)
1	2017	37.382,00	177,97	3.578,98
2	2018	38.559,00	183,42	3.855,00
3	2019	38.680,90	286,96	3.972,00
4	2020	39.184,00	826,95	3.991,00
5	2021	40.252,26	1.231,47	3.994,00

Sumber: Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

Pada Tahun 2021, produksi perikanan terutama perikanan budidaya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya budidaya udang vaname yang mampu mendongkrak nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan.

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026. Walaupun masih tahun awal dalam pelaksanaan rencana pembangunan strategis untuk mencapai target akhir periode pada Tahun 2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan harus terus memperhatikan potensi

unggulan daerah dari sector pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan melaksanakan strategi kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kualitas infrastruktur pertanian, penerapan teknologi pertanian, meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan metode LQ, sector unggulan di

Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2021 adalah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dan sector pertambangan dan penggalian. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam pertumbuhan ekonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu memberikan perhatian khusus dan terus berupaya meningkatkan nilai PDRB sector tersebut. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 selama 2 (dua) tahun terakhir, sector pertanian, perikanan, dan kehutanan tetap merupakan sector unggulan di Kabupaten Bangka Selatan.

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam rencana pembangunan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomidarisektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 harus diimplementasikan setiap tahunnya melalui RKPD. Untuk ituperan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dilaksanakan dalam dokumen rencana tahunan daerah.
2. Perlu dilakukan koordinasi peningkatan pertumbuhan ekonomi sector pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui forum THIS (*Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial*) yang melibatkan berbagai *stakeholder* terdiri dari Pemerintah Daerah dan swasta. Perangkat Daerah yang terlibat antara lain yang mampu urusan pertanian, kelautan dan perikanan; lingkungan hidup; pekerjaan umum dan penataan ruang; pertanian; bencana; dan unsure penunjang perencanaan pembangunan. Terutama upaya mengembalikan kejayaan lada

sebagai komoditas unggulan daerah Kabupaten Bangka Selatan.

3. Untuk menjamin keberlanjutan pertanian dan perkebunan, maka perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan mempertimbangkan penggunaan modal kerja yang ramah lingkungan.

## 6. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2022, Pangkalpinang
- Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Bangka Selatan 2022, Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka 2022, Toboali
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026, 2021
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, 2022
- Pieter Noisirifan De FRETES, Analisis Sektor Unggulan (Lq), Struktur Ekonomi (Shift Share), dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua 2018
- Robinson Tarigan, 2019, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, cetakan kesepuluh, Bumi Aksara Jakarta
- SATGAS COVID-19 PUSDALOPPS BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <https://covid19.babelprov.go.id/?date=2020-08-01>

<https://covid19.babelprov.go.id/?date=2021-12-31>

Tri Widodo, 2006, Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer, cetakan pertama, UPP STIM YKPN Yogyakarta

**KAMIKAWA****Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Inovasi**Website jurnal : <https://journal.babelprov.go.id/index.php/kamikawa/index>**STRATEGI PENGUATAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
MANUSIA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG*****STRATEGIES FOR STRENGTHENING THE ECONOMY AND HUMAN  
DEVELOPMENT IN POVERTY REDUCTION IN THE PROVINCE OF  
BANGKA BELITUNG ISLANDS*****Novita Frahesti Ade Wijaya<sup>1\*</sup>**<sup>1</sup>*Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*[\\*vita\\_soul03@yahoo.com](mailto:*vita_soul03@yahoo.com)**ABSTRAK**

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dalam menjalani kehidupan. Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 telah memuat isu strategis bidang ekonomi dan sosial. Sehubungan dengan semakin kompleksnya permasalahan kemiskinan, maka diperlukan penangan komprehensif. Dengan metode data panel *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) selama periode 2010-2021 serta merumuskan strategi pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan *Logical Framework Approach* (LFA). Hasil kajian membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak signifikan. Sedangkan secara statistik kemiskinan signifikan mempengaruhi IPM pada taraf nyata sebesar 6%. Perumusan strategi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penguatan ekonomi melalui berbagai sektor dan pendidikan serta kesehatan.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, *Feasible Generalized Least Square*, *Logical Framework Approach*

**ABSTRACT**

Poverty is a problem in development, not only limited to economic inability but also failure to fulfill fundamental rights for living. The RPJMD of the Bangka Belitung Islands Province for 2017-2022 has included strategic issues in the economic and social fields. In connection with the increasingly complex problem of poverty, a comprehensive response is required using the Feasible Generalized Least Square (FGLS) panel data method from 2010 to 2021 and formulating a development strategy for poverty reduction using the Logical Framework Approach (LFA). The results of the study proved that there is a negative effect of poverty on economic growth, but it is not significant. Meanwhile, statistically, poverty significantly affects the HDI (Human Development Index) at a significant level of 6%. Formulating the right strategy for overcoming poverty in the Province of the Bangka Belitung Islands covers strengthening the economy through various sectors, including education and health.

**Keywords:** Poverty, Economic Growth, HDI, *Feasible Generalized Least Square*, *Logical Framework Approach*

# Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota yang terletak di dua pulau besar yaitu Pulau Belitung dan Pulau Bangka. Pembangunan adalah suatu proses dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan yang mencakup berbagai perubahan mendasarkan status sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan program pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro 2011).

Perencanaan pembangunan nasional meliputi perencanaan pembangunan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disusun secara terintegrasi serta sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 memuat beberapa isu strategis bidang ekonomi dan sosial yang diangkat antara lain (i) pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan; (ii) masih lambatnya peningkatan usia harapan hidup masyarakat; dan (iii) masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah masyarakat. Isu strategis dari bidang-bidang tersebut sangat aktual dari

masa ke masa. Bahkan pada tataran global telah menjadi komitmen dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 25 September 2015 di New York Amerika Serikat. Hal ini diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2015-2030 yang berisi 17 tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, salah satu sebagai tujuan untuk penanggulangan kemiskinan.

Menurut Papilaya (2013), secara faktual kemiskinan di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang mendasar dalam pembangunan bangsa. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS dalam mengukur jumlah dan persentase penduduk miskin menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS 2015). Secara umum selama periode 2010-2021 tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi menunjukkan tren yang menurun. Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sepanjang 12 tahun terakhir merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebaliknya berbeda dengan Kabupaten Bangka Barat adalah daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah dan selalu di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat pada Tabel 1 menunjukkan capaian angka kemiskinan tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya tahun 2019.

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	7,81	5,36	5,57	5,40	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47	4,92	4,51	4,81
Belitung	10,13	6,97	7,26	8,48	7,36	8,38	7,85	7,77	7,56	6,29	6,27	7,15
Bangka Barat	5,25	3,59	3,72	3,26	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70	2,75
Bangka Tengah	8,07	5,56	5,77	5,46	5,27	5,67	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85	5,13
Bangka Selatan	6,19	4,23	4,40	4,01	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70	3,36	3,52	3,69
Belitung Timur	10,36	7,13	7,43	6,90	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06	6,60	6,52	7,20
Pangkalpinang	6,02	4,15	4,29	4,15	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95	4,25	4,36	4,76
Provinsi Kep. Babel	6,51	5,75	5,53	5,25	4,97	4,83	5,04	5,30	4,77	4,50	4,89	4,67

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (diolah)

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keberhasilan pembangunan suatu negara dan daerah dapat tercermin dari berbagai aspek misalnya ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang sifatnya umum dikarenakan dapat diukur secara kuantitatif dan dapat mendorong aspek lainnya. Menurut Sukirno (2000) salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah besarnya pertumbuhan ekonomi. Ekonomi

yang semakin bertumbuh berdasarkan teori klasik dan neoklasik akan menciptakan dan menghasilkan daya tetes ke bawah (*trickle down effect*) yang sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan kepada segenap masyarakat (Tambunan, 2003). Teori tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tiang dalam proses pengentasan berbagai persoalan sosial terutama kemiskinan dan ketimpangan.

Tabel 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2021

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	5,37	6,91	5,35	5,30	4,81	4,54	4,63	5,04	4,52	2,87	-0,71	7,48
Belitung	5,53	5,93	6,09	5,96	4,72	4,53	4,96	5,30	5,38	3,33	-2,28	5,64
Bangka Barat	4,37	5,51	5,49	5,09	4,72	5,03	4,80	5,26	5,20	7,06	-5,37	0,21
Bangka Tengah	4,61	6,01	5,02	3,30	1,50	0,31	3,05	3,46	3,42	1,21	-2,86	4,76
Bangka Selatan	5,97	6,42	4,70	4,45	4,44	4,27	4,30	4,57	4,52	2,53	-1,94	3,61
Belitung Timur	4,43	6,12	6,05	5,70	5,17	4,40	4,25	4,85	4,22	3,26	-0,64	4,55
Pangkalpinang	6,07	6,79	6,11	5,78	4,27	4,24	5,17	5,19	5,08	3,26	-3,01	9,27
Provinsi Kep. Babel	5,99	6,90	5,50	5,20	4,67	4,10	4,47	4,45	4,69	3,62	-2,59	5,09

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa perekonomian di 7 kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu 2010-2021 tren cenderung fluktuatif. Awal tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 memberikan tekanan luar biasa terhadap perubahan tatanan kehidupan sosial dan perekonomian nasional maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perekonomian secara umum tahun 2020 mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya. Dengan adanya berbagai kebijakan dalam penanggulangan Covid-19, maka berdampak terhadap perekonomian Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 5,09%. Tidak ada perbedaan antara capaian provinsi dengan kabupaten dan kota pergerakan perekonomian tumbuh positif. Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi ekonomi tumbuh sebesar 9,27% dan paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sementara itu Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah dengan ekonomi paling rendah tumbuh sebesar 0,21%. Jika dikaitkan tingkat kemiskinan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan, maka diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antardaerah (Kuncoro 2006). Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, SDM sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Arsyad (2010), salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia.

Lanjouw dalam Ginting *et al* (2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin. Aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan

produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Kemudian Zuhdiyaty dan David (2017), hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari IPM terhadap kemiskinan.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2021

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	66,41	67,37	67,99	69,34	69,79	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39	72,40	72,46
Belitung	66,79	67,17	67,87	69,27	69,56	70,29	70,81	70,93	71,70	72,46	72,51	72,57
Bangka Barat	63,16	64,00	64,92	65,85	66,43	67,23	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08	69,60
Bangka Tengah	65,10	66,09	66,88	67,67	68,09	68,88	68,76	68,99	69,52	70,33	70,45	70,89
Bangka Selatan	59,98	60,53	61,17	62,96	63,54	63,89	64,57	65,02	65,98	66,54	66,90	67,06
Belitung Timur	64,99	65,86	66,59	67,71	68,10	68,83	69,30	69,57	70,22	70,84	70,92	71,42
Pangkalpinang	74,68	75,02	75,69	76,14	76,28	76,61	76,73	76,86	77,43	77,97	78,22	78,57
Provinsi Kep. Babel	66,20	66,59	67,21	67,92	68,72	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (diolah)

Peningkatan IPM tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh semua dimensi, seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita. Berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika mengalami penurunan pengeluaran riil per kapita sebagai dampak pandemi Covid-19. Secara umum perkembangan IPM dari tahun 2010-2021 terus mengalami peningkatan. IPM rata-rata meningkat sebesar 0,52 poin. sejak tahun 2018 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Pada tahun 2021 capaian IPM di tingkat kabupaten/kota berada di rentang 67,07 untuk Kabupaten Bangka Selatan yang terendah dan Kota Pangkalpinang dengan rentang 78,57 tercatat dengan nilai tertinggi. Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah dengan IPM kategori tinggi. Sedangkan daerah dengan kategori IPM sedang adalah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat. Selaku pemilik capaian IPM tertinggi Kota Pangkalpinang didorong semua dimensi kehidupan. Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan IPM terendah, dikarenakan indeks pendidikan dan kesehatan masih kurang. Dimensi ekonomi untuk standar hidup layak melalui pendapatan pengeluaran per kapita riil terendah dimiliki

oleh Kabupaten Belitung Timur. Diasumsikan ketika kemiskinan mengalami penurunan, maka mempunyai pengaruh negatif bagi pencapaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lihat Tabel 3).

Manusia atau masyarakat adalah kekayaan dan modal dasar dalam pembangunan. Pemanfaatan SDA dan SDM dalam kemampuan yang dimiliki harus dapat dioptimalkan secara maksimal agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam kegiatan pembangunan yang berhasil dalam menghasilkan pemanfaatan dari SDA dan SDM yang ada di daerah bersangkutan. Pembangunan daerah terjadi apabila pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dengan melibatkan pihak swasta merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dalam suatu wilayah. Berangkat dari kondisi eksisting data selama 12 tahun terakhir menunjukkan pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Kemudian dengan memperhatikan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan kunci keberhasilan yang berpengaruh terhadap kemiskinan serta menjadi target pembangunan dalam rencana pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, maka diperlukan rencana jangka menengah

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

pembangunan daerah yaitu melalui strategi penguatan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2. Kajian Pustaka

#### Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dimensi kemiskinan mencakup empat hal pokok, diantaranya kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capability*), kurangnya jaminan (*low level of security*) dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*). Kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan.

Nurkse (1953), kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Para ekonom pembangunan menggunakan konsep kemiskinan absolut untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Adapun masalah yang timbul adalah sulitnya menentukan tingkat hidup minimum, karena tingkat tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu daerah ke daerah lainnya, yang mencerminkan perbedaan kebutuhan-kebutuhan psikologis, sosial dan ekonomi dari setiap individu. Karena itu, para ahli ekonomi cenderung membuat perkiraan-perkiraan yang serba konservatif atau sederhana tentang kemiskinan dunia dalam

rangka menghindari perkiraan-perkiraan yang berlebihan.

Metodologi umum yang digunakan sebagai dasar dari perkiraan tersebut adalah garis kemiskinan internasional yang tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau US\$2 per hari dalam dolar PPP (Todaro dan Smith 2006). Selanjutnya BPS (2008) penyebab kemiskinan dapat menjadi kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya tertentu sehingga mengikat seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur tatanan hidup yang tidak menguntungkan disebut kemiskinan struktural.

Berdasarkan pendekatan dasar, ada 3 indikator dasar dalam mengukur kemiskinan dan sering digunakan dalam banyak studi empiris:

- 1) *Head Count Index* (HCI-P0) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.
- 2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan melihat seberapa miskin orang miskin itu. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk semakin terpuruk.
- 3) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

BPS memiliki kriteria tersendiri dalam mendefinisikan kemiskinan, yakni melalui dua komponen berupa Garis Kemiskinan Makanan

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKMN) dengan rumus  $GK = GKM + GKMN$ . GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan GKMN adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (Damanhuri 2010).

### Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi suatu barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya serta indikator kunci keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau menambah tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas

perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun 14 sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diformulasikan sebagai berikut (Arsyad, 2010):

$$Gt = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$Gt$  = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

$Y_{rt}$  = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun  $t$

$Y_{rt-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi dapat mengalami peningkatan dan penurunan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Para ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang lambat atau mengalami kemunduran ekonomi akan menimbulkan implikasi ekonomi dan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan para ahli sejak berabad-abad yang lalu mencoba mencari formula untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan lapangan pekerjaan akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berarti juga peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu.

### Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep

pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith 2006). Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia secara parsial dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan dalam kehidupan manusia dapat teratasi, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan sebagainya. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial akan sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu mungkin berhasil akan tetapi beberapa aspek lainnya gagal.

Agar pengukuran pembangunan manusia dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarnegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk IPM yang merupakan aspek pembangunan manusia yang paling mendasar yakni *Longevity* (umur panjang dan

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

hidup sehat), *Knowledge* (pengetahuan) dan *Decent Living Standard* (standar hidup layak). Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa indikator sudah tidak tepat lagi dalam penghitungan IPM. Oleh karenanya pada tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda. Indikator *Longevity* (umur panjang) diukur dengan ukuran demografi yang sangat terkenal yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang didefinisikan sebagai perkiraan kemampuan rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak dilahirkan. Sementara dimensi *Knowledge* (pengetahuan) yang semula diukur menggunakan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), diganti dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi *Decent Living Standard* (standar hidup layak) yang semula diukur menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (untuk level daerah menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan).

IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni:

- a. IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai IPM < 60
- b. IPM kelompok “sedang” dengan kriteria  $60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$
- c. IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria  $70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$
- d. IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria Nilai IPM  $\geq 80$

IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai

mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia (BPS 2021). Pasca berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDSs) ditahun 2015, negara-negara di dunia melalui sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merumuskan kelanjutan agenda MDGs. Babak baru agenda pembangunan dunia telah mengembangkan konsep agenda pasca 2015 yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan yakni sampai tahun 2030. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan.

### 3. Metode

Sasaran kajian ini adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kurun waktu tahun 2010-2021. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 7 dan menjadi unit analisis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder berupa data kemiskinan yang diwakili dengan ukuran pertumbuhan ekonomi dan IPM. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kajian ini menggunakan analisis regresi data panel (*regression panel analysis*) model untuk melihat pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu yang merupakan gabungan data *time* dan *cross section*. Dengan kata lain, data panel adalah data yang diperoleh dari *cross section* yang diobservasi berulang pada unit individu yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian akan diperoleh gambaran tentang

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu.

Selanjutnya dilakukan pemilihan beberapa variable yang disesuaikan dengan objek dan fokus kajian serta pertimbangan ketersediaan

data. Dapat disimpulkan, model yang digunakan dalam kajian ini adalah *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Plit = \beta_0 + \beta_1LPEit + \beta_1IPMit + \varepsilon it$$

Dengan:

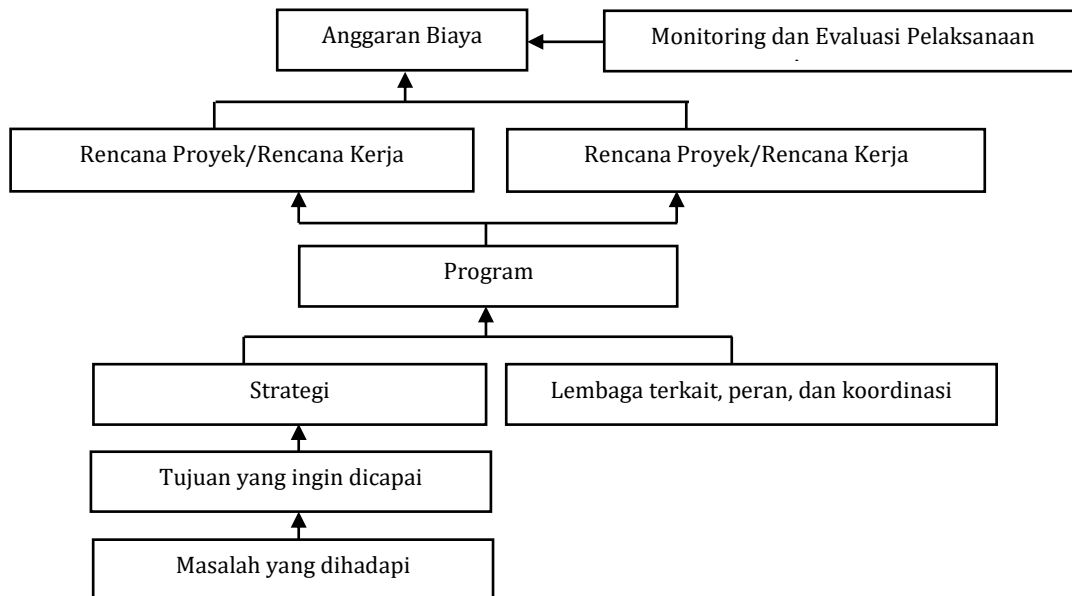
- $\beta$  : Koefesien Regresi
- $\beta_0$  : Intersep
- $Plit$  : Indeks Kedalaman Kemiskinan (Persen)
- $LPEit$  : Laju Pertumbuhan (Persen)
- $IPMit$  : Indeks Pembangunan Manusia
- $\varepsilon it$  : Residu
- $i$  : Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- $t$  : Tahun Observasi

Berdasarkan pada temuan hasil pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM, maka dilakukan rancangan strategi serta program dengan menggunakan metode Kerangka Kerja Logis atau *Logical Framework Approach* (LFA). Metode ini menggunakan teknik visualisasi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk merancang strategi serta program dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa ciri-ciri Metode LFA, antara lain: rumusan tujuan menjadi jelas untuk mendorong tercapainya pengambilan keputusan atas pendapat dan harapan berbeda dari para pemangku kepentingan, informasi disusun secara sistematis guna memudahkan pengamatan terhadap ikatan diantara berbagai komponen, dan penyajian

ringkasan strategi dan program dalam suatu format standar.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan metode LFA, adalah : (pertama) merumuskan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian, (kedua) menetapkan tujuan berdasarkan dari pokok permasalahan yang dihadapi, (ketiga) menentukan strategi dan program berdasarkan tujuan yang akan dicapai, (keempat) mengidentifikasi pihak-pihak terkait dan terlibat dalam mengimplementasikan strategi dan program yang dituangkan dalam perencanaan proyek atau kegiatan serta diikuti dengan monitoring dan evaluasi. Pada perencanaan proyek dibutuhkan jenis-jenis pendanaan yang berimplikasi pada rencana biaya yang harus disediakan serta diawasi penggunaannya melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Gambar 1 adalah bagan metode LFA yang digunakan dalam kajian ini.

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 1 Proses Pelaksanaan Metode *Logical Framework Approach* (LFA)

### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil estimasi pengaruh terhadap kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan bahwa model *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) merupakan model yang terbaik. Model FGLS dipilih

dikarernakan untuk mengatasi masalah heterokedastisitas dan autokorelasi yang terdapat dalam uji asumsi klasik dalam metode data panel sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil estimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan IPM

Variabel Bebas	Model Pertumbuhan Ekonomi			
	OLS	FEM	REM	FGLS
C	0,55215** (0,233)	2,72203* (0,017)	1,26601* (0,082)	2,77184* (0,014)
PI	0,00487** (0,630)	-0,00078*** (0,467)	0,00002** (0,998)	-0,00724** (0,464)
IPM	0,00049* (0,940)	-0,29934* (0,060)	-0,00947** (0,355)	-0,2993** (0,060)
Wilayah				
Kabupaten Belitung				0,07020** (0,413)
Kabupaten Bangka Barat				-0,30089** (0,003)
Kabupaten Bangka Tengah				-0,09189* (0,334)
Kabupaten Bangka Selatan				-0,26756 (0,042)
Kabupaten Belitung Timur				0,09973** (0,262)
Kota Pangkalpinang				0,14175** (0,284)

Keterangan: nilai dalam () merupakan nilai *p-value*

\*\*\*, \*\*, \* signifikan pada 1%, 5%, 10%

### Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara teori pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi (Warr 2006). Ekonomi yang semangkin

bertumbuh berdasarkan teori klasik dan neoklasik akan menciptakan dan menghasilkan daya tetes kebawah (*trickle down effect*) yang sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Tambunan 2003). Dollar dan Kray (2002) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil dari FLGS menunjukkan terdapat pengaruh negatif pada variabel kemiskinan (kedalaman kemiskinan) terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pengujian ini pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil ini sejalan dengan perkembangannya Todaro dan Smith (2006) dan Baudrillard (2011) yang telah mengkritisi teori *trickle down effect* tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi malah tidak berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan.

Atau dalam arti lain bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan manfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Waluyo 2004 dan Idris *et al* 2014). Hasil dari berbagai kajian memberikan kesimpulan bahwa efek daya tetes pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi polemik di kalangan akademisi. Oleh karena itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan menghasilkan daya tetes kebawah (*trickle down effect*) terhadap penurunan tingkat kemiskinan masih menjadi sebuah perdebatan terlebih pada kalangan akademisi.

### Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM

Salah satu faktor yang mengakibatkan ketertinggalan dan penghambat proses pembangunan dalam suatu negara adalah tingginya kemiskinan (Kuncoro 2005). Menurut Rintuh (2003) kemiskinan sebagai kesulitan seseorang dalam memenuhi kebutuhan serta untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Ketika kualitas SDM telah meningkat, maka akan menghasilkan tenaga kerja yang berpendidikan, berwawasan, serta sehat jasmani yang mendukung meningkatnya produktivitas. Naiknya produktivitas maka akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan

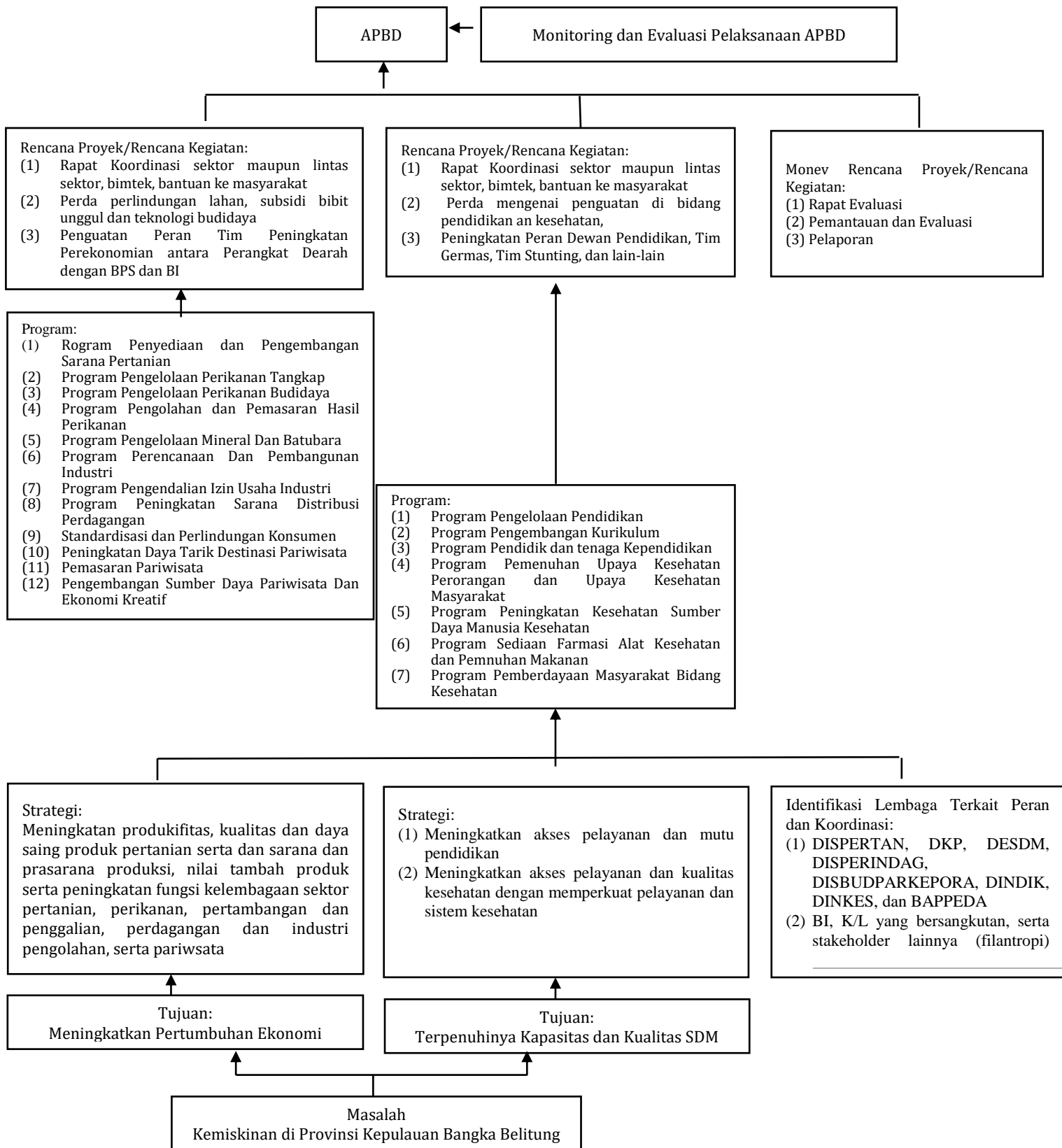
Sementara itu, terdapat pengaruh yang negatif pada variabel kemiskinan dan IPM. Dalam pengujian ini kemiskinan dengan menggunakan variabel P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) signifikan mempengaruhi IPM pada taraf nyata sebesar 6%. Artinya peningkatan kedalaman kemiskinan sebesar 1%, maka akan berdampak terhadap penurunan nilai IPM sebesar 0,2993 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini juga memasukkan dummy wilayah untuk melihat tingkat perbandingan nilai IPM kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari Kabupaten Bangka adalah Kabupaten Bangka Barat dengan nilai intersep (*constant + coefisien dummy*) sebesar 2,47095, Kabupaten Bangka Selatan sebesar 2,50428 dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 2,67995 signifikan pada taraf nyata kurang dari 10%. Sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ginting (2008) dan Nugraheni (2020), menyatakan bahwa IPM mempengaruhi garis kemiskinan secara negatif. Artinya semakin tinggi nilai IPM, maka garis kemiskinan akan semakin rendah.

### Perumusan Strategi dan Program

Berdasarkan hasil estimasi dengan melihat probabilitas pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM, serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2017-2022, visi pemerintah daerah adalah "*Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi*". Berfokus pada penguatan IPM, maka dirumuskan strategi program terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam metode kerangka kerja logis atau *Logical Framework Approach* (LFA) sebagaimana tersaji pada Gambar 2.

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 2 Perancangan strategi dan program penguatan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan LFA

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### Perumusan strategi penguatan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertama, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada tahun 2021 mulai bangkit kembali. Kedua, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2021 masuk dalam kategori tinggi serta sepanjang 12 tahun terakhir tren capaian IPM terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, diperlukan penguatan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan pertimbangan-pertimbangan mendasar seperti melihat kewenangan yang melekat di masing-masing daerah dengan melihat potensi wilayah yang dikembangkan serta pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Perencanaan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan adalah proses perencanaan yang menempatkan pembanguan ekonomi dan manusia sebagai prioritas utama. Diharapkan kebijakan serta strategi yang ditetapkan akan lebih aspiratif, akomodatif, dan responsif terhadap pembangunan terjadi.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berisikan kebijakan pembangunan daerah yang dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dokumen tahunan yang bersifat operasional. Selanjutnya dari proses perencanaan tersebut dirumuskan beberapa alternatif strategi yang bisa menjadi prioritas penguatan ekonomi dan pembangunan manusia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan 3 (tiga) strategi yang menjadi prioritas dan layak untuk diimplemtasikan. Strategi yang akan diterapkan akan disusun secara bertingkat dalam bentuk program penguatan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Strategi meningkatkan produkifitas, kualitas dan daya saing produk pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi, nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan sektor (i) pertanian; (ii)

perikanan; (iii) pertambangan dan penggalian; (iv) perdagangan dan industri pengolahan; (v) pariwisata.

Pengembangan perekonomian melalui berbagai sektor, dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Program yang diusulkan dalam lingkup sektor sesuai dengan strategi-strategi penanggulangan kemiskinan adalah:

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- e) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
- f) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- g) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- h) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- i) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- j) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- k) Program Pemasaran Pariwisata
- l) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Strategi meningkatkan akses pelayanan dan mutu pendidikan

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin yang terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang bidang ini efektif untuk mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Usulan rancangan program ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas bidang pendidikan yang mendukung ekonomi. Diketahui sebelumnya, pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting dalam meneningkatkan ekonomi. Dengan pendidikan yang memadai akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan, sehingga

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- akan meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk itu diperlukan rancangan program, dilakukan dengan:
- Program Pengelolaan Pendidikan
  - Program Pengembangan Kurikulum
  - Program Pendidik dan tenaga Kependidikan
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Peningkatan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Pemnuhan Makanan
3. Strategi meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan

Begitu pula pada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan kunci peningkatan investasi modal manusia. Dengan fasilitas dan kualitas jasa kesehatan yang memadai akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengaksesnya. Efek dari tingkat kesehatan yang tinggi akan menciptakan peluang lebih besar masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan arah kebijakan melalui meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. Untuk itu diperlukan rancangan program, dilakukan dengan:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Strategi Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Adanya pengaruh negatif variabel kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pengujiannya pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Adanya pengaruh negaif variabel kemiskinan terhadap IPM. Artinya peningkatan kedalaman kemiskinan sebesar 1%, maka akan berdampak terhadap penurunan nilai IPM sebesar 0,2993 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Adanya 3 (tiga) strategi terkait penguatan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Saran dari kajian ini adalah melaksanakan strategi penguatan ekonomi dan pembangunan manusia dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dirumuskan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Perlunya koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk memastikan bahwa dijalankan secara terpadu serta berkesinambungan oleh seluruh sektor terkait yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 6. Daftar Pustaka

- Arsyad L. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN.
- Baudrillard JP. 2011. Masyarakat Konsumsi. Yogyakarta (ID): Penerbit Kreasi Wacana. Ed ke-4.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2008. Jakarta (ID): BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015. Pangkalpinang (ID): BPS.
- Damanhuri DS. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor (ID): IPB Press.
- Dollar, Kraay. 2002. Growth Is Good For The Poor. *Journal of Economic Growth*. 7: 199-225
- Ginting, C.K.S, Lubis I., Mahalli K. (2008). Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. 4(1): 1-12.
- Kuncoro, M. (2005). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta (ID): Erlangga.

## Strategi Penguatan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta (ID): UPP AMP YKPN.
- Nugraheni, IL. 2020. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Geografi*. 8 (1): 28-34.
- Nurkse, R. 1953. *Problems of Capital Information in Underdeveloped Countries*. New York (ID): New York.
- Papilaya, CE. 2013. *Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pemiskinan Bangsa*. Bogor (ID): IPB Press.
- Rintuh, C.M. 2003. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Jakarta (ID): Dikti.
- Sukirno S. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. Jakarta (ID): UI-Press.
- Tambunan TH. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Ghalia Indonesia. Jakarta (ID): Ghalia Jakarta.
- Todaro MP, Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Dharma A, penerjemah; Maulana A, Sallama NI, editor. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari: *Economic Development*. Ed ke-11.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Jakarta (ID): Erlangga.
- Waluyo J. 2004. Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 9 (1): 1-20.
- Warr P. 2006. Poverty and growth in Southeast Asia. *ASEAN Economic Bulletin*. 23 (3): 279-302.
- Zuhdiyaty, David K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *Jibeka*. 11 (2): 27-31.

**KAMIKAWA****Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Inovasi**Website jurnal : <https://journal.babelprov.go.id/index.php/kamikawa/index>

---

**PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**  
*The Effect of Land Area, Harvest Area, Productivity and Rice Production on GRDP of the Agricultural Sector in West Bangka Regency***Arsi Wahyuni, Nizwan Zuhri<sup>2</sup> dan Devi Valeriani<sup>3</sup>***Program Studi Ekonomi, Universitas Bangka Belitung**\*Email korespondensi: arsiwahyuni98@gmail.com*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Jenis data adalah data kuantitatif berupa data luas lahan, luas panen, produktivitas, produksi padi dan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2020. Sumber data adalah data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Bangka Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan padi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat, luas panen padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat, produktivitas padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat dan produksi padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka barat.

**Kata kunci: Luas Lahan Padi, Luas Panen Padi, Produktivitas Padi, Produksi Padi dan PDRB Sektor Pertanian.**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze and determine the effect of land area, harvested area, productivity and rice production on the GRDP of the agricultural sector in West Bangka Regency. The analytical method used is panel data regression. The type of data is quantitative data in the form of data on land area, harvested area, productivity, rice production and GRDP of the agricultural sector in West Bangka Regency in 2013-2020. Sources of data are secondary data obtained from the BPS of West Bangka Regency and the Department of Agriculture of West Bangka Regency. The results of this study indicate that the area of rice land has a negative and significant effect on the GRDP of the agricultural sector in West Bangka Regency, the area of rice harvested has no effect on the GRDP of the agricultural sector in West Bangka Regency, rice productivity has a positive and significant effect on the GRDP of the agricultural sector in West Bangka Regency and rice production has no effect on the GRDP of the agricultural sector in West Bangka Regency.*

**Keywords: Rice Land Area, Rice Harvested Area, Rice Productivity, Rice Production and GRDP of the Agricultural Sector.**

---

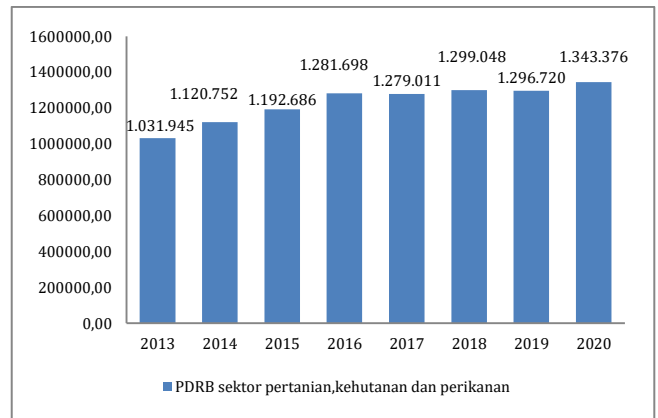
# PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

## 1. Pendahuluan

Sektor pertanian saat ini memiliki peranan strategis, yakni sebagai sumber utama kehidupan dan pendapatan petani, kehidupan sebagai penghasil pangan bagi masyarakat, sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku bagi industri pengolahan, sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari PDRB sub sektor pertanian khusus tanaman pangan padi sangat tinggi pada Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020).

Komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan masyarakat salah satunya adalah padi. Padi merupakan komoditi penghasil beras yang menjadi tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Usaha tani padi sudah merupakan bagian hidup dari petani Indonesia sehingga menciptakan lapangan kerja yang besar dan kontribusi dari usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga cukup besar (Hamdan, 2013). Besarnya luasan lahan yang dikelola dalam berusaha tani untuk menghasilkan produksi. Semakin besar lahan yang dipakai tentunya akan mendapatkan hasil semakin meningkat.

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha sektor pertanian atas harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (BPS Kabupaten Bangka Barat, 2016).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

Gambar 1.1 PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2020 (Juta Rupiah)

Dilihat dari Gambar 1 PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Bangka Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat Khususnya pada sektor pertanian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Khususnya pada Tahun 2020 nilai sektor pertanian Kabupaten Bangka Barat sebesar 1.343.376 juta rupiah. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Bangka Barat menjadi penyumbang kedua terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian juga merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja (BPS Kabupaten Bangka Barat, 2020).

Pengembangan usaha tani padi telah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengingat pemenuhan kebutuhan beras di Provinsi ini bergantung pada pasokan dari daerah lain. Produksi padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mampu memenuhi 12 persen kebutuhan masyarakat dan sisanya harus didatangkan dari luar Provinsi. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan produksi padi melalui percontaan sawah baru dan peningkatan adopsi inovasi teknologi (Fachrista, 2013). Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu daerah penghasil padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya padi lokal serta menjadi sentra produksi padi yang berperan penting sebagai penyuplai produksi padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2020). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

**PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

**Tabel 1. Nilai Luas Lahan Padi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2020 (Ha)**

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Muntok	2 445	174	298	314	189	314	207,5	97
Simpang Teritip	5 092	681	743	983	1 018	983	1 190	1 088,75
Jebus	4 820	2 575	1 850	611	669	611	863,8	802,5
Kelapa	2 974	1 824	2 106	2 283	2 033	2 283	2 569	2 257,25
Tempilang	764	677	2 205	774	894	774	976	760
Parittiga	481	68	134	81	439	81	140,5	91,25

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 1 luas lahan padi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013-2020 terdapat beberapa peningkatan dan penurunan luas lahan padi di Kabupaten Bangka Barat. Nilai luas lahan padi terluas terdapat di Kecamatan Kelapa pada Tahun 2020 nilai luas lahannya sebesar 2 257,25 Ha. Sedangkan untuk nilai luas lahan tersempit ada pada Kecamatan Parittiga sebesar 91,25 di Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah penghasil padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020).

Perubahan cuaca dinilai sebagai salah satu penyebab menurunnya produksi padi di Kabupaten Bangka Barat, selain perubahan cuaca panen petani menurun juga disebabkan oleh serangan hama penyakit. Meningkatnya ketersediaan lahan tanam padi maka diharapkan nilai produksi padi juga semakin meningkat (Prabowo, 2015). Untuk melihat luas panen padi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Nilai Luas Panen Padi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2020 (Ha)**

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Muntok	42	24	178	249	231	111	121	135
Simpang Teritip	70	403	357	566	184	483	1 070	584
Jebus	479	590	246	520	401	415	537,25	410
Kelapa	1210	1813	1108	1845	1998	1587	2 232	2243
Tempilang	311	539	742	424	751	800	1 027	1083
Parittiga	47	35	67	66	58	146	213	136

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 2 luas panen padi Kabupaten Bangka Barat. Luas panen tertinggi tiap tahun terdapat pada Kecamatan Kelapa. Pada Tahun 2020 luas panen di Kecamatan Kelapa sebesar 2.234 Ha, sedangkan luas panen terkecil di

Kabupaten Bangka Barat ada pada Kecamatan Muntok sebesar 135 Ha. Penyebab luas panen meningkat salah satunya adalah banyaknya permintaan produksi pada padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penurunan luas panen padi disebabkan karena lahan mengalami kekeringan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca yang kurang baik. (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

Permintaan beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum bisa tergantikan oleh bahan makanan lainnya, sehingga produksi padi harus meningkat seiring bertambahnya luas lahan dan luas panen padi di Kabupaten Bangka Barat, untuk melihat lebih jelas jumlah produktivitas padi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Nilai Produktivitas Padi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013- 2020 (Ton/Ha)**

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Muntok	1,88	1,93	2,1	2,53	2,75	3,03	3,03	3
Simpang Teritip	1,87	2,06	2,2	2,58	2,75	3,05	3,06	3
Jebus	1,81	2,00	2,3	2,56	2,85	3,07	3,11	3
Kelapa	2,01	2,07	2,3	2,61	2,89	3,18	3,22	3
Tempilang	1,96	2,02	2,3	2,57	2,85	3,13	3,19	3
Parittiga	1,89	1,90	2,1	2,53	2,75	3,03	3,03	2

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Nilai produktivitas padi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari Tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dilihat produktivitas tiap tahun mengalami peningkatan dan kestabilan. Pada Tahun 2020 produktivitas rata-rata perkecamatan sebesar 3 Ton/Ha kecuali Kecamatan Parittiga hanya sebesar 2 Ton/Ha. Meningkatnya produktivitas disebabkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi serta minat dari masyarakat. Sedangkan rendahnya nilai produktivitas disebabkan oleh jumlah pupuk yang kurang sehingga memperlambat produksi padi (Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020). Untuk lebih jelas jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Nilai Produksi Padi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2020 (Ton)**

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Muntok	79	46,4	374	630	635	335,78	366,03	408
Simpang Teritip	131	831,7	797	1 460	507	1 475,29	3 278	1 829
Jebus	869	1 183	565	1 330	1 145	1 272,3	1 669,87	1 248

**PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

Kelapa	2 429,5	3 757,9	2 598	4 823	5 767	5 047,48	7 191,80	7 404
Tempilang	610,5	1 087,7	1 684	1 093	2 138	2 507,62	3 272,93	314
Parittiga	89	66,5	141	167	159	441,65	644,33	314

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan dari Tabel 4 nilai produksi padi di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi. Produksi terbesar ada pada Tahun 2020 di Kecamatan Kelapa sebesar 7.404 Ton, sedangkan produksi terendah ada pada Tahun 2020 di Kecamatan Tempilang dan Parittiga sebesar 341 Ton. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi padi meningkat adalah penggunaan pupuk, bibit, luas lahan dan luas panen serta jumlah tenaga kerja. Sedangkan faktor yang menyebabkan produksi padi menurun adalah hama dan cuaca yang kurang mendukung (Onibala, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dirasakan perlu dilakukan penelitian tentang Pengaruh Luas Lahan, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat sendiri dipilih karena belum adanya penelitian tentang padi di Kabupaten Bangka Barat dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Luas Lahan, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten tersebut.

**2. Kajian Pustaka**

**Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani dan stok barang modal (Paksi, 2016). Adapun laju pertumbuhan ekonomi dalam konteks ini melibatkan PDRB, sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik akan bergantung pada faktor-faktor produksi seperti berikut: (Todaro, 2010).

Persamaan  $\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$

- $\Delta Y$  = Tingkat pertumbuhan ekonomi
- $\Delta K$  = Tingkat penambahan barang modal
- $\Delta L$  = Tingkat penambahan tenaga kerja
- $\Delta T$  = Tingkat penambahan teknologi

Teori klasik pertumbuhan ekonomi Kuznet, bahwa sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional bagi negara berkembang. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk sumbangan produk, sumbangan pasar dan sumbangan devisa. Sumbangan faktor produksi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan mobilitas sektoral tenaga kerja (Kurniawati, 2020).

Teori Richardo menjelaskan tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tanah, kapitalis dan buruh. Demikian penilaian kritis dari teori Richardo mengenai pertumbuhan pertanian, bahwa Richardo menekankan pentingnya pertumbuhan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi sebab pembangunan industri tergantung pada sektor tersebut (Rahardjo, 2013).

**Produk Domestik Regional Bruto**

Indikator lain makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu daerah selama satu periode tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu (Rahardja dan Manurung, 2008). PDRB dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu (Putri, 2018):

1. Pendekatan Produksi  
Perhitungan PDRB keseluruhan dari nilai produk barang dan jasa akhir dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun.
2. Pendekatan Pendapatan  
Perhitungan PDRB untuk jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun.
3. Pendekatan Pengeluaran  
Perhitungan dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung PDRB yang akan menghasilkan nilai jumlah pengeluaran dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto,

## **PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

perubahan stok dan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahnya dengan kata lain semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Sari, 2013).

### **Teori Produksi**

Kata produksi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *production* dalam kamus bahasa Indonesia, kata produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Selain itu dua makna lain dari produksi yaitu hasil dan pembuatan. Produksi adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Duwila, 2015). Pengertian lain produksi adalah setiap proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dinamai proses produksi karena proses produksi mempunyai teknis yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi (Arie, 2015). Fungsi produksi diartikan sebagai suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (*output*) dengan faktor-faktor produksi (*input*). Dengan demikian ada hubungan yang erat antara *input* dan *output* seperti yang dikemukakan Sudarsono mengenai fungsi produksi adalah hubungan teknis yang menghubungkan *input* dan hasil produksinya atau *output* (Alvio, 2015).

### **Fungsi Produksi**

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (*Y*) dan variabel yang menjelaskan (*X*). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa *output* dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa *input*. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain: 1. Dengan fungsi produksi, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara faktor produksi (*input*) dan produksi (*output*) secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti, 2. Dengan fungsi produksi, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan (*dependent variable*), *Y*, dan variabel yang menjelaskan (*independent variable*), *X*, serta sekaligus mengetahui hubungan antar variabel penjelas. Secara matematis, hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \dots \dots \dots (1)$$

### **Usaha Tani**

Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengalokasikan sumber daya yang dimiliki petani agar berjalan secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut agar memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya (Soekartawi, 2011). Pendapat lain tentang ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara menentukan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga produksi pertanian menghasilkan pendapatan petani yang lebih besar, ilmu usaha tani juga didefinisikan sebagai ilmu mengenai cara petani mendapatkan kesejahteraan (Wanda, 2015).

### **Tanaman Padi**

Tanaman padi merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan pokok karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Padi adalah komoditas utama yang berperan sebagai pemenuh kebutuhan pokok karbohidrat bagi penduduk. Komoditas padi memiliki peran pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama yang setiap tahunnya meningkat sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang besar, serta berkembangnya industri pangan dan pakan (Yusuf, 2010). Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan apalagi di daerah perdesaan. Hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi. Padi merupakan tanaman yang termasuk genus *Oryza L* yang meliputi kurang lebih 25 spesies terbesar di daerah tropis dan sub tropis, seperti Asia dan Afrika (Mubaroq, 2013).

### **Luas Lahan**

Luas lahan pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan (pangkey, 2016). Kajian pertanian dalam geografi pertanian berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam konteks ruang, lokasi pertanian secara keseluruhan dan aktivitas-aktivitas didalamnya yaitu tanaman peternakan, pengalihan *output* dan *input* yang diperlukan untuk produksi ladang (tanah), tenaga, pupuk, dan pemupukan, benih, pestisida dan lain-lain. Dilihat dari pengertian geografi pertanian termasuk dalam kelompok geografi manusia, atau geografi sosial. Geografi sosial penekanan kajiannya pada aspek aktivitas manusia dalam konteks keruangan, karakteristik penduduknya dalam menyikapi alam, organisasi sosial yang terbentuk sehubungan dengan sikapnya

## PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

bermasyarakat, dan kebudayaan yang unik dari aktivitasnya tersebut. (Pangkey, 2016).

### Luas Panen

Luas panen padi merupakan agregasi luas panen padi sawah dan padi ladang (Suprianto, 2015). Luas panen adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur (BPS Kabupaten Bangka Barat, 2020). Arti lain luas panen merupakan faktor produksi kedua yang sangat berperan penting karena jika luas tanaman yang dapat dipanen tinggi maka semakin tinggi pula produksi padi yang diperoleh (Putri, 2015). Luas lahan panen padi tergantung pada luas tanam dan faktor produksi (Nazaruddin, 2019).

### Produktivitas

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang atau jasa) dengan pemasukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas merupakan ukuran efisiensi produktif suatu bandingan antara hasil keluaran dan masukan, masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai (Sutrisno, 2011). Produktivitas merupakan konsep rasio yaitu rasio keluaran (output) terhadap masukan (input) yang lebih besar. Sehingga produktivitas dapat dibuat menjadi lebih besar melalui peningkatan salah satu output pada tingkat input yang konstan, mengurangi penggunaan input, ataupun kombinasi keduanya (Mahambeng, 2015).

### 3. Metode

Penelitian ini menganalisis pengaruh luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi dan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Bangka Barat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, serta sumber-sumber pendukung lainnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi dari Tahun 2013-2020 di Kabupaten Bangka Barat dan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2020. Kabupaten Bangka Barat

terdiri dari Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Parittiga sehingga populasi berjumlah 6 kecamatan dikali 8 tahun menghasilkan 48 observasi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sampel jenuh yang berarti seluruh dari populasi adalah sampel penelitian (Setyawan, 2017). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah jumlah luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2013-2020 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bangka Barat.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Data time series merupakan data yang terdiri atau satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Data cross section merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu (Basuki dan Prawoto, 2017). Berbagai langkah analisis perlu dilakukan diantaranya yaitu: Regresi data panel, Pemilihan model estimasi, Uji kelayakan model.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

#### Uji Chow Test

Model ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara common effect model dan fixed effect model dengan ketentuan, jika nilai probabilitas  $F < 0,05$  maka model yang terbaik adalah fixed effect model, sebaliknya jika nilai probabilitas  $F > 0,05$  maka model yang terbaiknya adalah common effect model. Hasil uji chow test pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.535826	(5,38)	0.7478
Cross-section Chi-square	3.270192	5	0.6584

Sumber: Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji chow diperoleh probabilitas pada cross-section F sebesar 0,7478 dengan tingkat signifikan  $\alpha$  5 persen (0,05). Nilai probabilitas  $0,7478 > 0,05$  menunjukkan bahwa keputusan model yang digunakan dari hasil uji chow test adalah common effect model.

#### Uji Hausman Test

**PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

Uji chow test dengan hasil model common effect model yang tepat digunakan, maka selanjutnya dilakukan uji hausman test untuk menentukan model terbaik antara random effect model dan fixed effect model dengan ketentuan, jika nilai probabilitas < 0,05 maka model yang terbaik adalah fixed effect model, namun jika nilai probabilitas > 0,05 maka model yang terbaik adalah random effect model. Hasil uji hausman test dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6 Hasil Uji Hausman Test**

Chi-Sq.			
Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.679129	4	0.6129

Sumber: Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji hausman test dapat dilihat nilai probabilitas pada cross-section random sebesar 0,6129 dengan tingkat signifikan  $\alpha$  (0,05), maka nilai probabilitas 0,6129 > 0,05 yang menunjukkan bahwa model yang terbaik dan sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model.

**Uji Lagrange Multiplier**

Uji lagrange multiplier (LM) merupakan uji untuk mengetahui model yang terbaik dan tepat digunakan antara random effect atau common effect. Jika nilai probabilitas <  $\alpha$  (0,05) maka model yang baik digunakan adalah random effect sebaliknya jika nilai probabilitas >  $\alpha$  (0,05) maka model yang baik digunakan adalah common effect model. Hasil uji LM pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7 hasil Uji Lagrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.220229 (0.2693)	39.89357 (0.0000)	41.11380 (0.0000)

Sumber: Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 hasil Uji LM dapat dilihat nilai probabilitas 0,2693 > 0,05 yang menunjukkan bahwa model yang terbaik dan sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah common effect model.

**Regresi Data Panel**

Berdasarkan hasil uji estimasi model regresi data panel yaitu uji chow test, uji hausman test dan uji lagrange multiplier yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa model terbaik dan tepat digunakan dalam penelitian ini adalah common effect model. Common effect model adalah model paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross section untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8 Hasil Analisis Common Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.02548	0.047132	297.5771	0.0000
LLP	-0.041566	0.008405	-4.945396	0.0000
LPP	0.012059	0.022517	0.535560	0.5950
PvP	7.70.10 <sup>8</sup>	1.47.10 <sup>8</sup>	5.254091	0.0000
PP	0.023223	0.020714	1.121093	0.2685
R-squared	0.693173	Mean dependent var	14.02000	
Adjusted R-squared	0.664631	S.D. dependent var	0.084853	
S.E. of regression	0.049139	Akaike info criterion	-3.089988	
Sum squared resid	0.103830	Schwarz criterion	-2.895071	
Log likelihood	79.15972	Hannan-Quinn criter.	-3.016329	
F-statistic	24.28602	Durbin-Watson stat	1.373422	
Probabilitas(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 hasil regresi menggunakan common effect model diperoleh persamaan model yaitu:

$$PEP_{it} = 14,02548 - 0,041566 LLP_{it} + 0,012059 LPP_{it} + 7.70E-08 PvP_{it} + 0.023223 PP_{it}.....(2)$$

Persamaan regresi tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- Pada saat luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi nilainya 0, maka PDRB sektor pertanian bernilai 14.02548
- Koefisien luas lahan padi sebesar -0.041566, artinya jika luas lahan padi mengalami kenaikan sebesar satu persen, sedangkan luas panen, produktivitas dan produksi padi tetap, maka PDRB sektor pertanian akan mengalami penurunan sebesar -0.041566 persen.
- Koefisien luas panen padi sebesar 0.012059, artinya jika luas panen padi mengalami peningkatan sebesar satu persen, sementara luas lahan, produktivitas dan produksi padi tetap, maka PDRB sektor pertanian akan mengalami peningkatan sebesar 0.012059 persen.
- Koefisien produktivitas padi sebesar 7.70.10<sup>8</sup>, artinya jika produktivitas padi mengalami peningkatan sebesar satu persen, sementara luas lahan, luas panen dan produksi padi tetap, maka PDRB sektor pertanian akan mengalami peningkatan sebesar 7.70.10<sup>8</sup> persen.

**PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

- e. Koefisien produksi padi sebesar 0.023223, artinya jika produksi padi mengalami peningkatan sebesar satu persen, sementara luas lahan, luas panen dan produktivitas padi tetap, maka PDRB sektor pertanian akan mengalami peningkatan sebesar 0.023223 persen.

**Estimasi Model**

Estimasi model memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat dengan rumus sebagai berikut:

$$PEP_{it} = \alpha + \beta_1 LLP_{1it} + \beta_2 LPP_{2it} + \beta_3 PVP_{3it} + \beta_4 PP_{4it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Maka model matematis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PEP_{it} = 14.02548 - 0.041566 LLP_{it} + 0.012059 LPP_{it} + 7.70E-08 PVP_{it} + 0.023223 PP_{it} \dots \dots (4)$$

**Uji Hipotesis**

**Uji t**

Uji t ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Melihat lebih rinci hasil uji t penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.02548	0.047132	297.5771	0.0000
LLP	-0.041566	0.008405	-4.945396	0.0000
LPP	0.012059	0.022517	0.535560	0.5950
PvP	7.70.10 <sup>8</sup>	1.47.10 <sup>8</sup>	5.254091	0.0000
PP	0.023223	0.020714	1.121093	0.2685

Sumber: Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat nilai uji t atau uji parsial dari masing-masing variabel, analisis uji tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh luas lahan padi terhadap PDRB sektor pertanian  
Berdasarkan hasil uji t variabel X1 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -4.945396 dengan signifikan  $0.0000 < 0,05$ , sedangkan  $t_{tabel}$  dengan  $df = (n-k)$  atau (48-5) maka nilai  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar 1.68107. sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel} = -4.945396 < 1.68107$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yaitu luas lahan padi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian.
2. Pengaruh luas panen padi terhadap PDRB sektor pertanian  
Berdasarkan hasil uji t variabel X2 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.535560 dengan signifikan  $0.5950 > 0,05$ , sedangkan  $t_{tabel}$  dengan  $df = (n-k)$

atau (48-5) maka nilai  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar 1.68107. sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel} = 0.535560 < 1.68107$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, yaitu luas panen padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian.

3. Pengaruh produktivitas padi terhadap PDRB sektor pertanian  
Berdasarkan hasil uji t variabel X3 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.254091 dengan signifikan  $0.0000 < 0,05$ , sedangkan  $t_{tabel}$  dengan  $df = (n-k)$  atau (48-5) maka nilai  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar 1.68107. sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel} = 5.254091 > 1.68107$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, yaitu produktivitas padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian.
4. Pengaruh produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian  
Berdasarkan hasil uji t variabel X4 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.121093 dengan signifikan  $0.2685 > 0,05$ , sedangkan  $t_{tabel}$  dengan  $df = (n-k)$  atau (48-5) maka nilai  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar 1.68107. sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel} = 1.121093 < 1.68107$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak, yaitu produksi padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian.

**Uji F**

Uji ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji F atau uji simultan dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10 Hasil Uji F

F-statistic	24.28602
Probabilitas(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 10 hasil uji F-statistik sebesar 24.28602 yang akan dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat.

Nilai  $F_{tabel}$ , dengan derajat bebas  $(k-1)$  atau  $(5-1) = 4$  dan penyebut  $(n-k)$  atau  $(48-5) = 43$ , taraf signifikan  $\alpha (0,05)$ , maka diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,59. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel} (24.28602 > 2,59)$  yang berarti bahwa  $H_0$  ditolsk  $H_5$  diterima.

Nilai probabilitas sebesar  $0.000000 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi secara besama-sama berpengaruh terhadap PDRB sektor

## PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

pertanian di Kabupaten Bangka Barat. Kesimpulannya luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Effect Specification	
R-Squared	0.693173

Sumber: Output Statistik, data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 11 diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.693173 atau 69,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat hanya sebesar 69,31 persen. Dengan kata lain variabel PDRB sektor pertanian dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi sebesar 69,31 persen, sedangkan sisanya sebesar 30,69 persen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### Pembahasan

#### Pengaruh Luas Lahan Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Nilai koefisien variabel luas lahan padi diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-4.945396 < 1.68107$  dengan nilai probabilitas 0.0000 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yaitu luas lahan padi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Semakin tinggi nilai luas lahan maka PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat akan menurun.

Luas lahan padi memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini terjadi karena nilai luas lahan di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif serta adanya permintaan padi yang meningkat dari pemerintah. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. Pengaruh luas lahan padi tidak hanya pada tingkat efisiensi tetapi juga mempunyai dampak pada upaya pembangunan pada sektor pertanian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Baldan (2020) dengan hasil yang menunjukkan nilai luas lahan memiliki pengaruh

negatif terhadap pertanian, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Andrias (2017) dengan hasil yang menunjukkan luas lahan berpengaruh positif terhadap pertanian. Hal ini dapat dikatakan bahwa faktor penyebab luas lahan berpengaruh negatif adanya pengaruh dari penggunaan pupuk yang kurang hingga faktor cuaca yang kurang mendukung serta adanya alih fungsi lahan pertanian.

#### Pengaruh Luas Panen Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Nilai koefisien variabel luas panen padi diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} = 0.535560 < 1.68107$  dengan nilai probabilitas 0.5950 yang berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, yaitu luas panen padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Semakin meningkat nilai luas panen maka meningkat juga PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat.

Turunnya peran luas panen dan intensitas tanam yang belum dimungkinkan karena semakin sempitnya luas lahan maksimal. Nilai luas panen di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Penurunan luas panen disebabkan adanya faktor cuaca yang kurang baik sehingga menyebabkan banyak panen yang gagal. Melalui dukungan prasarana dan sarana dari pemerintah seperti ketersediaan bibit unggul, alat mesin dan sumber daya manusia untuk mencapai target tanam maksimal.

Menurut pendapat Soekartawi bahwa semakin luas panen yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan yang baik (Sucihatingsih, 2013). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nasution (2012) yang menjelaskan lahan panen tidak kuat mempengaruhi terhadap PDRB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Usman (2018) yang menjelaskan bahwa luas panen berpengaruh terhadap pertanian.

#### Pengaruh Produktivitas Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Nilai koefisien variabel produktivitas diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 5.254091 > 1.68107$  dengan nilai probabilitas 0.0000 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, yaitu produktivitas padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Semakin meningkat produktivitas padi maka PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat akan menurun. Produktivitas adalah jumlah hasil produksi dibagi dengan luas lahan yang ditanam. Upaya peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan

## PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

penyuluhan agar pengetahuan dan keterampilan teknis dapat meningkat. Produktivitas padi di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan produksi dengan menggunakan sarana produksi yang sama, sehingga terjadi peningkatan.

Terdapat dua aspek penting dalam produktivitas yaitu, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan kemampuan dalam menggunakan sumberdaya secara minimum guna mencapai hasil yang optimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ilmu ekonomi pertanian produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diinginkan diterima pada waktu panen dengan biaya yang harus dikeluarkan (Siringo, 2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian, et al (2020) yang menjelaskan bahwa produktivitas padi memiliki pengaruh terhadap pertanian, produktivitas padi meningkat diperlukan peningkatan produksi padi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan Alam (2017) yang menjelaskan bahwa produksi dan produktivitas yang berpengaruh negatif terhadap pertanian.

### Pengaruh Produksi Padi Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Nilai koefisien variabel produksi diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel} = 1.121093 < 1.68107$  dengan nilai probabilitas 0.2685 yang berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak, yaitu produksi padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Semakin meningkat produksi padi maka meningkat juga PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat. Produksi padi di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Produksi merupakan suatu proses atau cara untuk meningkatkan bahan baku menjadi produk jadi dengan mengkombinasikan produksi tenaga kerja dan teknologi dalam mengelolanya. Hasil produksi padi dengan nilai jual yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup petani.

Produksi padi di Kabupaten Bangka Barat tergolong rendah dibandingkan Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman, input produksi yang masih lemah dan sarana prasarana petani yang kurang memadai. Produksi adalah setiap proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dinamai proses produksi karena proses produksi mempunyai teknis yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi (Duwila, 2015). Teori

klasik Kuznet mengatakan bahwa sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk sumbangan produk, sumbangan pasar dan sumbangan devisa. Sumbangan faktor produksi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan mobilitas sektoral tenaga kerja (Kurniawati, 2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2018) yang menjelaskan bahwa produksi tidak berpengaruh terhadap pertanian, dengan kata lain produksi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Meiliawati (2020) yang menjelaskan bahwa produksi berpengaruh terhadap petani untuk menghasilkan produksi yang diinginkan.

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian tentang pengaruh luas lahan, luas panen, produktivitas dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat maka disimpulkan:

1. Luas lahan padi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat.
2. Luas panen padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat.
3. Produktivitas padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat.
4. Produksi padi tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat.
5. Luas Lahan, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat.

Dari pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada para petani di Kabupaten Bangka Barat harus meningkatkan produktivitas dan produksi padi dan hendaknya para petani tau seberapa pentingnya padi bagi kehidupan.
2. Petani di Kabupaten Bangka Barat dapat memperluas lahan padi agar panen yang dihasilkan juga meningkat. Serta petani dapat menyediakan pupuk terlebih dahulu, supaya ketika sudah waktunya tanaman padi diberikan pupuk tidak lagi terhalang dengan keterbatasan pupuk.

## PENGARUH LUAS LAHAN, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

3. Diharapkan kepada petani dapat memperhatikan aspek penting dalam bertani padi agar dapat menghasilkan produksi lebih baik lagi setiap tahunnya.
4. Diharapkan para pemerintah lebih memberikan bimbingan dan penyuluhan secara intensif dan mendengar keluh setiap petani dalam kegiatan usaha tani padi baik pada tahap pengolahan lahan hingga proses panen serta lebih memperhatikan pertanian padi.
5. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studinya, karena masih banyak kekurangan dan permasalahan-permasalahan dalam pertanian khususnya pertanian padi khususnya di Kabupaten Bangka Barat.

### 6. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2021*. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- BPS Kabupaten Bangka Barat. (2021). *Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2021*. Kabupaten Bangka Barat.
- Basuki A.T dan Imamuddin Yuliadi. (2015). *Ekonometrika Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Fachrista, I.A., R. Hendayana dan Risfaheri. (2013). *Faktor Sosial Ekonomi Penentu Adopsi PTT Padi di Bangka Belitung*. *Jurnal Informatika Pertanian* Vol.22 No.2 Hal.114-120.
- Hamdan. (2013) *Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi pada Usaha Tani Padi Sawah di Bengkulu*. Balai Pengkaji Teknologi Pertanian. Bengkulu.
- Mubarq, I.A. (2013). *Kajian Bionutrien Caf dengan Penambahan Ion Logam Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Padi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nazaruddin. (2019). *Luas Tanam dan Luas Panen Padi Di Jawa Barat WIDTH OF PLANTS AND WIDTH OF RICE HARVEST IN WEST JAVA*. *Jurnal Triton* Vol. 10 No.1. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.
- Onibala, Alvio G. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Barat*. *Jurnal Agri-Sosio Ekonom Unsrat*.Vol.13.No.2A Hal.15-25.
- Pangkey Marchel Christian, Vecky A.J Masinambow, et al. (2016). *Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Barat (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I dan Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 2 Hal. 234-243.
- Perda Kabupaten Bangka Barat. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kabupaten Bangka Barat. Perda Kabupaten Bangka Barat.
- Prabowo Arie. (2015). *Karakteristik Dan Peranan Lembaga Petani Pemakai Air Dalam Mendukung Produktivitas Hasil Padi Di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan*. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Vol.11 No.3. Kabupaten Bangka Selatan. Hal.1-15.
- Rahardja dan Manurung. (2010). *Teori Ekonomi Mikro (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Sari, Perdana Lia. (2013). *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jindah*, Vol.2 No.2. Provinsi Bali. Hal. 716-732.
- Soekartawi. (2003). *Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Pembahasan Analisis Cobb-Douglas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. (2011). *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Wanda, F.A. (2015). *Analisis Pendapatan Usaha Tani Jeruk Siam (Studi Kasus Di Desa Padang Pangrapat Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser*. *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol.3 No.3. Kabupaten Paser.

**KAMIKAWA****Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Inovasi**Website jurnal : <https://journal.babelprov.go.id/index.php/kamikawa/index>**Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba*****Cash Disbursement Management System for the School Operational Assistance Program at SDN 13 Koba***Wisnu Wiranata<sup>1\*</sup>, Anggraeni Yunita<sup>2</sup>, Duwi Agustina<sup>3</sup>, Rulyanti Susi Wardhani<sup>4</sup><sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bangka Belitung\*Email korespondensi: [wisnuwiranata1998@gmail.com](mailto:wisnuwiranata1998@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan pengeluaran kas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 13 Koba pada tahun ajaran 2020/2021. Pengelolaan yang dimaksud mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana BOS di SDN 13 Koba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian mencakup kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan dana BOS dilakukan dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh kepala sekolah dan para guru berdasarkan hasil analisis kondisi pendidikan saat ini dan berbagai kegiatan para guru dari bidang studi yang pelaksanaannya bersamaan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sosialisasi RKAS kepada pihak komite sekolah untuk dicermati lebih lanjut, dan sosialisasi RKAS kepada para wali murid. (2) Penggunaan dana BOS dilaksanakan secara triwulan: Triwulan I: Januari-April, Triwulan II: Mei-Agustus, dan Triwulan III: September-Desember yang penggunaannya dialokasikan sesuai dengan 8 standar pendidikan. (3) Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung dengan cara rutin memeriksa laporan keuangan sekolah pada akhir bulan, berkomunikasi dengan Bendahara serta melihat langsung penggunaan Dana BOS. (4) Pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah secara rutin setiap bulan dan dilaksanakan pada akhir bulan dan secara triwulan sekolah juga harus menyerahkan laporan ke dinas.

**Kata kunci:** Dana BOS, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan.**ABSTRACT**

*This study aims to describe the cash disbursement management system for the School Operational Assistance (BOS) program at SDN 13 Koba in the 2020/2021 school year. The management in question includes aspects of planning, implementing, and supervising the use of BOS funds at SDN 13 Koba. This type of research is descriptive qualitative research. The research subjects included school principals, treasurers and school committees. Data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive data analysis. The results of the study indicate that: (1) BOS fund planning is carried out by preparing School Activity Plans and Budgets (RKAS) by school principals and teachers based on the results of an analysis of current educational conditions and various activities of teachers from the field of study whose implementation coincides with the preparation of the Budget Plan. School Income and Expenditures (RAPBS), socialization of RKAS to school committees for further scrutiny, and socialization of RKAS to parents. (2) The use of BOS funds is carried*

## **Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba**

*out on a quarterly basis: Quarter I: January-April, Quarter II: May-August, and Quarter III: September-December whose use is allocated according to 8 educational standards. (3) Supervision of BOS Funds is carried out by the principal directly by routinely checking school financial reports at the end of the month, communicating with the Treasurer and directly observing the use of BOS Funds. (4) Reports carried out by the Head of School regularly every month and carried out at the end of the month and on a quarterly basis the school must also submit a report to the service.*

**Keywords: BOS Fund, Planning, Implementation, Monitoring, Reporting.**

---

### **1. Pendahuluan**

Salah satu faktor penting dalam proses pembangunan nasional yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu pendidikan. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar namun, banyak kendala yang dihadapi terutama masalah dana (Julantika, 2017). Salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yaitu membuat program bantuan operasional sekolah (BOS) dan ditunjukkan kepada lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Program pengelolaan dana BOS harus mengikuti buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS agar dana BOS yang dikeluarkan pemerintah dapat terselenggara dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, bantuan dana BOS dikelola oleh bendahara dan pegawai honorer SDN 13 Koba. Penulis memilih SDN 13 koba karena SDN 13 Koba merupakan penerima dana BOS dan penulis juga melihat keadaan sekolah tersebut sudah tertata dengan baik, sehingga mendorong penulis melakukan penelitian tentang sistem pengelolaan pengeluaran kas dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis sistem pengelolaan pengeluaran kas dana bantuan operasional sekolah yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Menurut peneliti agar bisa menghasilkan informasi pengeluaran kas yang baik perlu adanya transparansi pihak yang terkait kepada masyarakat termasuk wali murid dan guru-guru lainnya mengenai pengeluaran kas dana BOS tersebut. Sistem pengelolaan pengeluaran kas ini dimaksudkan untuk melihat sistem pengelolaan pengeluaran kas dana BOS di SDN 13 Koba.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengevaluasi tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 13 Koba. Jenis

penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap suatu masalah dari objek penelitian (Kuncoro, 2013). Fokus pada penelitian ini meliputi sistem pengeluaran kas khususnya pada program bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 13 Koba. Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri 13 Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2020 sampai dengan selesai. Menurut Supardi (2013) menjelaskan bahwa sumber data dalam suatu penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak yang berkompeten di Sekolah Dasar Negeri 13 Koba dan data sekunder yang digunakan dalam bentuk literatur, dokumentasi dan laporan terkait dengan pengeluaran kas dana bantuan operasional sekolah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diambil dengan bentuk gambar dan foto-foto sebagai pelengkap informasi seperti pembukuan dan pelaporan pengeluaran kas pada penggunaan dana bantuan operasional sekolah (Sugiyono, 2015).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Sugiyono, 2018). Reduksi data dengan merangkum data yang berpusat pada masalah yang dikaji khususnya pengeluaran kas sesuai dengan sistem pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 13 Koba. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk berupa bagan atau uraian singkat sehingga dapat membuat kesimpulan dan tindakan. Verifikasi data merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan

## Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba

dalam menganalisis data dengan memperhatikan tingkat kesesuaian dan konsistensi data.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Deskripsi Lokasi Penelitian

SD Negeri 13 Koba merupakan Sekolah Dasar yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba, Desa Kurau yang dikepalai oleh bapak Pahtoni, S.Pd.I Sebagai kepala sekolah di SD Negeri 13 Koba.

**Tabel I. Keadaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri 13 Koba**

No	Keterangan Gedung	Jumlah	Keadaan/kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ke-t
1	Ruang Kelas	7	7	-	-	-
2	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-	-
3	Ruang Kepala Sekolah	1	1	-	-	-
4	Ruang Guru	1	1	-	-	-
5	Musholla	1	1	-	-	-
6	Ruang UKS	1	1	-	-	-
7	Ruang BP/BK	-	-	-	-	-
8	Gudang	-	-	-	-	-
10	Ruang Kamar Mandi Kepala Sekolah	1	1	-	-	-
11	Ruang Kamar Mandi Guru Laki	1	1	-	-	-
12	Ruang Kamar Mandi Guru Perempuan	1	1	-	-	-
13	Ruang Kamar Mandi Siswa Laki-laki	4	4	-	-	-
14	Ruang Kamar Mandi Siswa Perempuan	2	2	-	-	-
15	Halaman/Lapangan Olahraga	1	1	-	-	-

(Sumber data dari kepala Tata Usaha SD Negeri 13 Koba Per 2020/2021)

**Tabel II. Keadaan Guru di SD Negeri 13 Koba**

No	Pengelola Tenaga Pendidik	PNS	Non PNS		Jumlah
			LK	PR	
1	Guru PNS diperbantukan tetap	5	5	-	10
2	Guru Tetap	-	-	-	-

Yayasan						
3	Guru Honorer	-	-	-	-	-
4	Kepala tata usaha	-	-	-	1	1
5	Staf Tata Usaha PNS	-	-	-	-	-
6	Staf Tata Usaha (Honorer)	-	-	-	-	-
7	Staf Perpustakaan	-	-	-	1	1
8	Penjaga Sekolah	-	-	1	-	1
Jumlah		5	5	1	1	13

(Sumber data dari kepala Tata Usaha SD Negeri 13 Koba Per 2020/2021)

**Tabel III. Keadaan Siswa di SD Negeri 13 Koba**

Keadaan kelas siswa	Tahun Pelajaran 2020/2021			Jumlah
	Jumlah Rombongan Belajar	Laki-Laki	Perempuan	
Kelas I	5	10	17	27
Kelas II	5	15	12	27
Kelas III	6	17	16	33
Kelas IV	4	10	12	22
Kelas V	4	11	8	19
Kelas VI	5	16	12	28
Jumlah	29	79	77	156

(Sumber data dari kepala Tata Usaha SD Negeri 13 Koba Per 2020/2021)

#### Deskripsi Responden

##### Kepala Sekolah

SD Negeri 13 Koba yang dipimpin oleh bapak Pahtoni, S.Pd.I lahir di Karawang 31 Januari 1968, selain sebagai Kepala Sekolah beliau juga memiliki kompetensi yaitu sebagai guru pendidikan Agama Islam. Menurut beliau, sejak pertama menjabat sebagai Kepala sekolah di SD 13 Koba, sekolah ini belum terbangun dengan baik. Beliau juga melihat kondisi sekolah yang belum dimanfaatkan dengan optimal oleh karna itu kepala sekolah membuat tim BOS yaitu kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah untuk membuat perencanaan pengembangan sekolah SD 13 Koba dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang dianggarkan melalui dana BOS. Menurut beliau dana BOS bisa membantu untuk meningkatkan fasilitas dan penunjang lainnya yang diperlukan sekolah, maka dari itu beliau dan timnya menyusun perencanaan RAPBS dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sekolah.

## Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba

### Bendahara

Bendahara SD 13 Koba yaitu Ibu Lilis Suriyany Siahaan, S.Pd Lahir di Simalungun 27 mei 1965 selain sebagai bendahara beliau juga berperan sebagai guru kelas di SD Negeri 13 Koba. Selaku bendahara, beliau juga berperan untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar dana BOS bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Proses perencanaan sendiri diawali dengan penyusunan RAPBS dengan menentukan apa saja yang dibutuhkan sekolah. Dana BOS yang diperoleh bersumber dari dana APBN dan APBD. Menurut bendahara sendiri proses pelaksanaan penggunaan dana BOS sudah dilakukan dengan akuntabel dan transparan dengan wali murid dengan melakukan pembuatan spanduk dana BOS disekolah. Proses pengawasan dana BOS dilakukan oleh dinas terkait yaitu BPKAD dan Inspektorat yang mana selanjutnya dilakukan pelaporan dalam bentuk SPJ dan laporan lainnya.

### Komite Sekolah

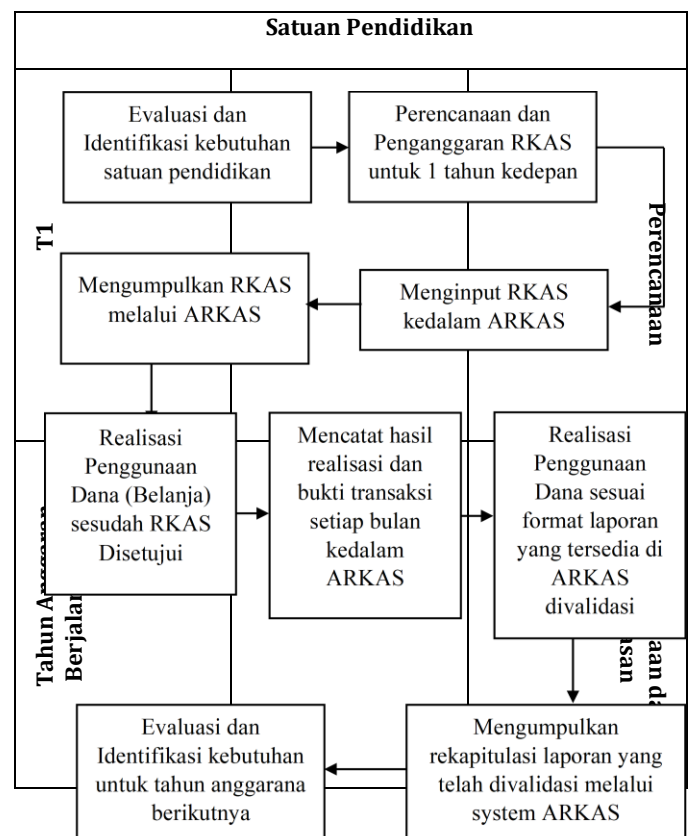
Komite sekolah yang diwawancara peneliti adalah Bapak Alek yang menjabat sebagai ketua komite sekolah SD Negeri 13 Koba. Bapak Alek sebagai salah satu responden yang mengerti tentang dana BOS yang dilaksanakan di SD Negeri 13 Koba. Beliau juga terlibat dalam penyusunan RAPBS dan ikut rapat pembahasan dana BOS Menurut beliau sekolah sudah melaksanakan dengan baik untuk kemajuan sekolah. Beliau mengatakan bahwa dana BOS SD Negeri 13 Koba cair dalam 3 tahap tahap pertama 30% tahap kedua 40% dan tahap ketiga 30%. Dana yang cair sudah sesuai dengan jumlah murid yang ada namun kendala yang terjadi sering keterlambatan pencairan dana BOS dikarenakan adanya perubahan dalam RAPBS. Dana bos selanjutnya digunakan untuk pembelian barang dan jasa dan modal belanja pegawai dan keperluan sekolah lainnya.

### Sistem Pengelolaan Dana BOS SDN 13 Koba

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan pihak sekolah serta dikaitkan dengan penelitian terdahulu maka pengelolaan adalah seni dalam mengatur dan menata dalam sebuah wadah demi tercapainya tujuan yang di tetapkan bersama. Pengelolaan ini mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran dana BOS bertujuan untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran dana BOS antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang

ada dan mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan (Titi Arti 2020). Pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS yang dilakukan oleh SDN 13 Koba adalah merencanakan kegiatan dan anggaran selama satu tahun ke depan bersama-sama. Selanjutnya, rencana kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dipublikasikan kepada Wali Murid sebagai bentuk kontrol yang dapat dilakukan oleh Wali Murid terkait pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS. Dan melakukan pertanggung jawaban setiap triwulan kepada UPTD dan Tim BOS Pusat sebagai laporan pertanggung jawaban kepada atasan. Serta, menempelkan di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk keterbukaan transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mia Silmi Nurdiani, Nugraha Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah bahwa Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan diperkuat dengan dokumen yang ada penulis mampu menggambarkan pengelolaan dana BOS SD Negeri 13 Koba. Data dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Gambar IV.1 merupakan alur sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah

**Gambar I. Alur Sistem Pengelolaan Dana BOS**



## Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba

		Pelaporan
--	--	-----------

Sumber: JUKNIS, 2021.

Keterangan:

RKAS : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

ARKAS : Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

### Perencanaan Dana BOS SD Negeri 13 Koba

Perencanaan dana BOS di SD Negeri 13 Koba diawali pembentukan tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah. Penyusunan pertama kali dilakukan Tim BOS SD Negeri 13 Koba dengan menganalisis keperluan yang dibutuhkan oleh sekolah dan melihat kondisi pendidikan di SD Negeri 13 Koba saat ini mana yang perlu dikembangkan terlebih dahulu dalam 1 tahun kedepan. Selanjutnya Tim BOS menyusun RKAS dengan sebaik-baiknya dalam 1 tahun yang berupa program kerja dan rencana kegiatan. Menurut hasil wawancara dari ketiga responden dan dilihat dari dokumen-dokumen yang ada, dana yang didapatkan oleh SD Negeri 13 Koba berasal dari dana APBN dan dana APBD yaitu dana dari pemerintah pusat dan dana dari pemerintah daerah yang pencairannya ada 3 tahap yaitu tahap pertama 30% tahap kedua 40% dan tahap ketiga 30% yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 6 Tahun 2021.

Berdasarkan dari ketiga responden sosialisasi penggunaan dana BOS sudah dilaksanakan melalui rapat sekolah hal ini juga diperkuat oleh daftar hadir rapat. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi tentang dana BOS yang diterapkan sekolah kepada para guru dan komite sekolah. Menurut peneliti, sosialisasi yang dilakukan sekolah sudah baik tetapi melihat dari jawaban komite sekolah wali murid kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan dana BOS. Dengan adanya sosialisasi ini bisa mempermudah komunikasi antara Tim BOS dalam pengalokasian dana BOS dan apa saja masalah yang ada dalam dana BOS itu sendiri.

## Pelaksanaan Dana BOS SD Negeri 13 Koba

**Tabel IV. Sebaran Pencairan Dana BOS SD Negeri 13 Koba**

No.	Tahap	Jumlah (Rp)	Persen
1	Triwulan 1	64.394.000	44 %
2	Triwulan 2	54.884.000	37 %
3	Triwulan 3	27.422.000	19 %
<b>Total</b>		<b>146.700.000</b>	<b>100 %</b>

(Sumber data dari bendahara SD Negeri 13 Koba Per 2020/2021)

Tabel IV.5. menunjukkan bahwa tahun ajaran 2020/2021 jumlah total dana BOS yang diterima SD Negeri 13 Koba sebanyak Rp. 146.700.000 dengan sistem pencairan 3 kali dalam satu tahun dengan masing-masing pembagian di setiap tahap berbeda.

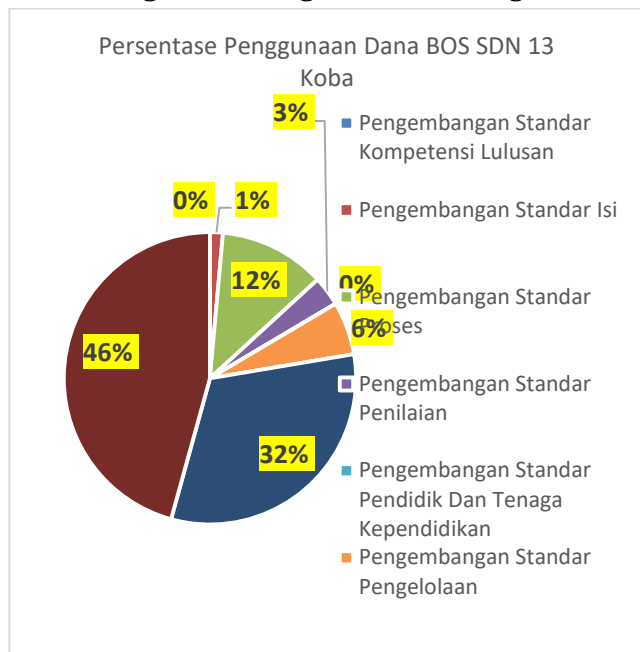
**Tabel V. Penggunaan Anggaran dana BOS SD Negeri 13 Koba Berdasarkan 8 Standar Pendidikan**

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Persen (%)
1.	Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan	-	0
2.	Pengembangan Standar Isi	2.095.000	1
3.	Pengembangan Standar Proses	17.243.000	12
4.	Pengembangan Standar Penilaian	4.830.000	3
5.	Pengembangan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	-	0
6.	Pengembangan Standar Pengelolaan	8.620.000	6
7.	Pengembangan Standar Pembiayaan	46.852.000	32
8.	Pengembangan Standar Sarana Prasarana	67.060.000	46
<b>Total</b>		<b>146.700.000</b>	<b>100</b>

(Sumber data dari bendahara SD Negeri 13 Koba Per 2020/2021)

**Gambar II. Persentase BOSnas yang diterima SDN 13 Koba**

## Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba



(Sumber data dari bendahara SD Negeri 13 Koba Per 2020/2021)

Berdasarkan hasil analisis hasil pelaksanaan dana BOSnas SDN 13 Koba pada Gambar IV.2, penulis melihat sebagian besar dana BOSnas dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah yaitu sebesar 46 %. Hal ini dapat dikarenakan sekolah melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan laptop, *cartridge* meja kayu/rotan, serat biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Selanjutnya dana BOSnas digunakan untuk Standar Pembiayaan sebesar 32% yang meliputi pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, penyelenggaraan keguatan peningkatan kompetensi keahlian, dan pembayaran honor. Sebesar 12% untuk Standar Proses yang meliputi penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakurikuler, serta administrasi kegiatan sekolah. Sebesar 6% untuk Standar Pengelolaan yaitu untuk penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, laporan RKAS, E-Rapor, DAPODIK, serta pengembangan profesi pendidik. Sebesar 3% untuk Implementasi Sistem Penilaian yang meliputi kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.

**Tabel VI. Komponen Pembiayaan dana BOS SD Negeri 13 Koba**

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.495.000	Pembiayaan pengelolaan sekolah

2.	Penerimaan Peserta Didik Baru	765.000	Pembiayaan pengelolaan sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan (pendataan melalui aplikasi dapodik)
3.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	678.000	Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah
4.	Pelaksanaan Administrasi Sekolah	49.032.000	Pembelian peralatan/perengkapan sekolah
5.	Pengembangan Perpustakaan	5.500.000	Pembiayaan pengembangan perpustakaan
6.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah	1.900.000	Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan sekolah
7.	Penyediaan Aat Multi Media Pembelajaran	51.000.000	Pembelian alat dan bahan habis pakai
8.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	8.800.000	Biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan sekolah di bank atau kantor pos
9.	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian	300.000	Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah
10.	Pembayaran Honor	14.400.000	Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan sekolah
11.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	4.830.000	Pembelian alat dan bahan habis pakai
<b>Total</b>		<b>Rp146.700.000</b>	

(Sumber data dari bendahara SD Negeri 13 Koba Per 2020/2021)

Selain pengalokasian dana BOSnas dan BOSdakab di atas, menurut ke tiga responden, sekolah juga pernah mengalami kendala dalam pelaksanaan Dana BOS. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana yang harus diterima oleh sekolah. Hal ini tentu memberi dampak bagi pihak sekolah, terutama jika sekolah sudah

## **Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba**

memiliki rencana pada awal pembelajaran jadi terkadang mengalami kendala. Sejauh ini semua rencana yang telah disusun oleh pihak sekolah, komite dan orangtua murid mayoritas telah terlaksana, karena pihak sekolah memiliki komitmen bahwa apa yang sudah direncanakan akan diusahakan untuk dilaksanakan.

### **Pengawasan Dana BOS di SD Negeri 13 Koba**

Pengawasan yang dilakukan Kepala Sekolah yaitu melakukan kerjasama dengan bendahara dengan melakukan pemeriksaan pelaporan keuangan setiap triwulan untuk apa saja dana tersebut digunakan dan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan dinas terkait. Berdasarkan pemaparan data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di SD Negeri 13 Koba transparansi perencanaan anggaran dana BOS sangat penting dilakukan, sehingga semua pihak sekolah mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana BOS di sekolah SD Negeri 13 Koba. Keterbukaan antara komponen sekolah atau warga sekolah termasuk wali murid akan menimbulkan dampak positif. Adanya ikatan saling percaya antar semua warga sekolah akan menyebabkan sekolah tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

### **Pelaporan Dana BOS di SD Negeri 13 Koba**

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah secara rutin dalam hal laporan setiap bulan dan dilaksanakan pada akhir bulan dan secara triwulan sekolah juga harus menyerahkan laporan ke dinas. Namun, di luar dari jadwal pelaporan akhir bulan Kepala Sekolah juga sering melakukan komunikasi dengan bendahara terkait dengan dana yang sudah dikeluarkan dengan melihat langsung apakah barang yang dibeli itu ada, sehingga Kepala Sekolah benar-benar bertanggung jawab atas dana yang sudah dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bendahara sekolah SD Negeri 13 Koba, dapat peneliti simpulkan bahwa pelaporan penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah dan dinas terkait telah dilakukan dalam bentuk kegiatan pembukuan dimana dilakukan kegiatan pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran dana BOS. Pembukuan dilakukan oleh bendahara BOS sekolah sebagai proses pembuktian dan merangkum semua kegiatan yang terkait dengan dana BOS. Jika ada monitoring laporan keuangan sekolah sudah tertata rapi dan dapat dipakai oleh tim monitoring sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penggunaan dana BOS sekolah.

### **Transparansi Pengelolaan Dana BOS**

Manajemen sekolah harus dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Ismi Solikhathun 2016). Indikator transparansi terdiri dari adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana BOS dan kemudahan pengaksesan informasi terkait penggunaan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah di SD Negeri 13 Koba, penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya baik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan dana BOS yang tidak melibatkan wali murid dan diwakilkan oleh komite sekolah, kemudian pada tahap pelaksanaan penggunaan dana BOS hanya dilaksanakan oleh pihak sekolah yaitu kepala sekolah, bendahara dan honorer.

Tahap pelaporan penggunaan dana BOS hanya dilaksanakan pada saat rapat pembagian raport siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaanya terhadap masyarakat termasuk wali murid dan guru-guru lainnya masih kurang dan hanya diketahui oleh pihak pengurus dana BOS sekolah saja. Transparansi ini dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut, dengan menempelkan di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk keterbukaan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sekolah juga dapat melakukan sosialisasi dan bahkan bersama-sama melakukan pembuatan anggaran sekolah, dan di akhir tahun ajaran sekolah dalam bentuk laporan keuangan yang harus diketahui oleh yang berkepentingan atau *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

## **4. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

1. Perencanaan dana BOS SD Negeri 13 Koba dilakukan dengan menyusun RKAS di SD Negeri 13 Koba disusun oleh tim BOS Sekolah terdiri dari Kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan para guru untuk merencanakan anggaran dalam satu tahun.
2. Pelaksanaan dana BOS SD Negeri 13 Koba dengan menerima dana BOS sebesar Rp. 146.700.000 dengan pembagian disetiap tahap yaitu triwulan pertama sebesar 44% tahap

## Sistem Pengelolaan Pengeluaran Kas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SDN 13 Koba

kedua 37 % dan tahap ketiga sebesar 19% total keseluruhan 100%. Pengalokasian dana BOS sudah sesuai dengan 8 standar pendidikan.

3. Pengawasan dana BOS SD Negeri 13 Koba dilakukan kepala sekolah yaitu melakukan kerja sama dengan bendahara yaitu melakukan pemeriksaan pelaporan keuangan setiap triwulan an dilakukan monev dengan dinas terkait.
4. Pelaporan penggunaan dana BOS SD Negeri 13 Koba telah dilakukan oleh Kepala Sekolah secara rutin laporan setiap bulan dan secara triwulan sekolah juga harus menyerahkan laporan ke dinas.
5. Tranparansi penggunaan dana BOS SD Negeri 13 koba masih belum sepenuhnya baik, dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang kurang melibatkan wali murid sehingga anggaran penggunaan dana BOS hanya diketahui oleh pihak pengurus dana BOS sekolah saja.

### Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka peneliti memberikan saran, yaitu:

#### 1. Bagi peneliti

Dengan penelitian yang dilakukan peneliti semakin memahami tentang sistem pengeluaran kas dana BOS di SD Negeri 13 koba dan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah guna mengoptimalkan mutu pendidikan. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang dana BOS di SD Negeri 13 Koba penulis menyarankan untuk meneliti tentang transparansi dan efektifitas dari Tim BOS dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 13 Koba.

#### 2. Bagi Sekolah yang diteliti

Dalam melancarkan transparansi penggunaan dana BOS tidak terlepas dari peran serta semua pihak oleh karena itu tim BOS harus menjalin komunikasi yang baik dan adanya keterbukaan dengan semua pihak mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri 13 Koba.sekolah juga harus melakukan publikasi supaya semua pihak mengetahui semua kegiatan dana BOS yang berupa papan pengumuman yang bisa dilihat semua pihak.

## 5. Daftar Pustaka

Arti, Titi, 2020. *Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bos Terhadap Akuntabilitas Dan*

*Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Di Sma Negeri 21 Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Julantika, Tutus, Djoko Supatmoko dn Taufik Kurrohman, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Tahun 2014*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Volume IV (1) : 1-5. Diakses pada tanggal 14 Mei 2020

Kuncoro, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Elangga.

Solikhatun Ismi, 2016. *Analisis Pengeloaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Supardi, 2013. *Aplikasi Stastistika Dalam Penelitian Konsep Statistika Yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Belitung No. 2 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam,  
Telp. (0717) 439336, Fax (0717) 439335 Pangkalpinang 33148 e-mail : kamikawa7902@gmail.com

ISSN 2809-6207



ISSN 2809-6452

